



**PENGELOLAAN DESA WISATA RENGGANIS BERBASIS
KELOMPOK SADAR WISATA DI DESA GLINGSERAN
KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Oleh

**Ridho Tri Afrianto
NIM. 140910201028**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PENGELOLAAN DESA WISATA RENGGANIS BERBASIS
KELOMPOK SADAR WISATA DI DESA GLINGSERAN
KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi
dan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Ridho Tri Afrianto
NIM. 140910201028

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan karunian Allah SWT, dengan rasa tulus dan rendah hati, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibunda Sri Giniati dan Ayahanda Sutaji, sebagai bhakti, hormat, dan rasa terima kasih yang senantiasa melantunkan doa, restu dan motivasi yang begitu luar biasa kepada penulis sehingga sampai saat ini penulis masih bisa berdiri tegak dalam menghadapi berbagai rintangan dan cobaan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia, karena penulis sadar bahwa selama ini belum bisa berbuat lebih untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuat saya termotivasi untuk tetap bermanfaat bagi orang lain.
2. Semua guru saya, mulai dari TK Mandiri, SD Negeri Periuk 06, SMP Negeri 5 Tangerang, SMA YUPPENTEK 1 Tangerang, dan Universitas Jember. Terima kasih telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan pembelajaran hidup yang sangat berharga.
3. Almamater saya Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Jangan membandingkan dirimu dengan siapapun di dunia ini. Kalau kau melakukannya, sama saja dengan menghina dirimu sendiri”

(Bill Gates)¹

“Satu satunya hal yang harus kau takuti adalah ketakutan itu sendiri”

(Franklin D Roosevelt)²

“Memuliakan manusia, berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya”

(KH. Abdurahman Wahid)³

¹ <https://www.kutipkata.com/motto-hidup-singkat-bermakna-berbagai-tokoh-dunia/>

² <https://www.kutipkata.com/motto-hidup-singkat-bermakna-berbagai-tokoh-dunia/>

³ <https://www.idntimes.com/life/inspiration/putri/15-perkataan-bijak-dari-gus-dur-buat-anak-muda-di-indonesia/full>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Ridho Tri Afrianto

NIM : 140910201028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengelolaan Desa Wisata Rengganis Berbasis Kelompok Sadar Wisata di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso” adalah benar-benar hasil karya sendiri, terkecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 November 2018

Yang menyatakan,

Ridho Tri Afrianto
NIM. 140910201028

HALAMAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DESA WISATA RENGGANIS BERBASIS KELOMPOK
SADAR WISATA DI DESA GLINGSERAN KECAMATAN WRINGIN
KABUPATEN BONDOWOSO**

Oleh

**Ridho Tri Afrianto
NIM. 140910201028**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pengelolaan Desa Wisata Rengganis Berbasis Kelompok Sadar Wisata di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso” karya Ridho Tri Afrianto telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : 26 November 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris,

Dr. Sutomo, M.Si
NIP 196503121991031003

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP 195805101987022001

Anggota Tim Penguji:

1. Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si ()
NIP 195607261989021001
2. Hermanto Rohman, Sos, MPA ()
NIP 197903032005011001
3. M. Hadi Makmur, Sos, M.AP ()
NIP 197410072000121001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Pengelolaan Desa Wisata Rengganis Berbasis Kelompok Sadar Wisata di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso; Ridho Tri Afrianto; 140910201028; 2018; 101 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan Desa Wisata Rengganis berbasis Kelompok Sadar Wisata di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk mendukung roda perekonomian negara. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan menteri Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 menyatakan bahwa kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan. Walaupun Indonesia sudah mengalami kemajuan besar pada sektor pariwisata diikuti dengan kontribusi bagi perekonomiannya, akan tetapi didalam pengelolaannya masih ada yang kurang sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk menanganinya.

Melihat permasalahan tentang pengelolaan pariwisata yang dianggap kurang menguntungkan masyarakat/komunitas sekitar wisata maka diperlukan pengelolaan pariwisata yang baik. Tata kelola pariwisata yang baik salah satunya yaitu dengan melibatkan masyarakat, proses pengelolaan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan/pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil dari kegiatan pariwisata. Jadi pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, masyarakat/komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat/komunitas lokal.

Penelitian ini menggunakan konsep pengelolaan yaitu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengorganisasian serta didalamnya terdapat prinsip pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat

yaitu mengikutkan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan dan adanya pendidikan bagi masyarakat lokal. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan Desa Wisata Rengganis Berbasis Kelompok Sadar Wisata di Desa Glingseran, fokus penelitian ini yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatan hasil. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik menguji keabsahan data menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat dan Triangulasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah proses peengelolaan sudah berjalan dengan optimal walaupun masih ada beberapa kekurangan yaitu pengelolaan dilakukan secara swadaya sehingga masih ada beberapa fasilitas penunjang yang belum ada seperti tidak adanya toilet dan mushola, kepengurusan pokdarwis hanya beberapa saja yang aktif sehingga pokja atraksi tidak berjalan lagi fungsinya untuk menjalankan wahana Flyng fox, pihak pengelola jarang berjaga di pelataran wisata dan parkir pada saat hari-hari biasa serta pola prilaku masyarakat yang masih belum berubah seperti cara berpakaian dan gaya hidup dan pihak pengelola masih belum bekerjasama dengan pihak swasta/investor.

PRAKATA

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-NYA, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengelolaan Desa Wisata Rengganis Berbasis Kelompok Sadar Wisata Di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso”. Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini telah penulis selesaikan dengan tidak terlepas dari doa, motivasi dan suntikan semangat dari kedua orang tua, dosen, sahabat, teman-teman, serta bantuan dari berbagai pihak dalam proses penelitian. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak berikut:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Bapak Dr.Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Sutomo, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Drs. Agus Suharsono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si dan Bapak Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas waktu, bimbingan, sumbangsih pemikiran, semangat dan kesabarannya sehingga penulis mendapatkan asupan ilmu pengetahuan. Semoga ilmu bapak mendapatkan manfaat dan keberkahan.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan pelayanan administratif.
8. Bapak Mulyono, selaku operator program studi Ilmu Administrasi Negara.

Terima kasih atas kesabaran dalam setiap melayani segala urusan administratif selama ini. Semoga jasa dan dedikasi bapak yang luar biasa ini selalu mendapatkan keberkahan.

9. Seluruh narasumber, Bapak Sulaedi, Bapak Abdahu, Bapak Bisnu, Ibu Desy, Bapak zainullah, Bapak Achmad Eko Wicaksono, Bapak Junaidi dan seluruh masyarakat Desa Glingseran yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi sehingga proses penelitian selama ini berjalan dengan lancar dan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kedua orang tua penulis, Ibunda Sri Giniati dan Ayahanda Sutaji serta mbah uti dan mbah kung yang tidak pernah berhenti berdoa dan memberikan semangat serta motivasi terbesar kepada penulis hingga saat ini. Semoga Ibu dan Ayah selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT.
11. Kedua saudara penulis, Rheni Prasetyowati dan Rheza Adi Septiawan serta keponakan Elmyra Khanza Armadi dan Nayla Salsabila Armadi yang selalu membantu dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
12. Sahabat penulis di “Rumah Biru”, spesial terima kasih kepada Winda Rossalia, Eka Serli Haniah Oktahana, Zulfa Mazidah, Nadya septyana, Dimas Baskoro, Muh. Fathikun Nada, Crystal Erawati, Karomatul Afidah, Juliyul Hidayatullah dan Bayu Maulana yang menjadi keluarga sejak mahasiswa baru. Terima kasih atas kebersamaan, canda, tawa, perjuangan selama ini. Semoga proses pembelajaran yang kita jalani memberikan manfaat dan kita semua menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya.
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, kekompakan dan kekeluargaan yang terjalin mulai dari semester satu hingga sekarang.
14. Teman-teman penulis sejak bersekolah di SMPN 5 Tangerang dan SMA YUPPENTEK 1 Tangerang.
15. Ruang proses penulis di kampus Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi

(Himaistra) dan Lembaga Ilmiah Mahasiswa Sospol (Limas) serta teman-teman KKN UMD 17 Desa Ardisaeng Bondowoso terimakasih atas pengalaman bersama 45 harinya.

16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga kebaikan berbagai pihak tersebut memperoleh balasan dari Allah SWT dengan pahala yang berlipat. Sebagai penulis tentunya berharap semoga skripsi ini menjadi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran selalu penulis terima demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Wassalaamu 'alaikum Wr.Wb

Jember, 30 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Konsep Dasar	13
2.2 Good Governance	14
2.3 Otonomi	17
2.3.1 Otonomi Daerah	18
2.3.2 Otonomi Desa	19
2.4 Konsep Pengelolaan Pariwisata	21
2.4.1 Pengelolaan.....	21
2.4.2 Prinsip-prinsip Pengelolaan Pariwisata	23
2.5 Konsep Pariwisata	26

2.5.1 Pengertian Pariwisata	26
2.5.2 Jenis-jenis Pariwisata	28
2.5.3 Komponen-komponen Pariwisata	29
2.6 Desa Wisata	31
2.5 Community Based Tourism	34
2.5 Penelitian Terdahulu	38
2.5 Konsep Pariwisata	40
BAB 3. METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	43
3.3 Data dan Sumber Data	44
3.4 Penentuan Informan Penelitian	46
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data	48
3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data	50
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data	53
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	55
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bondowoso.....	55
4.1.2 Gambaran Umum Desa Glingseran	60
4.1.3 Profil Desa Wisata Rengganis	64
4.2 Pengelolaan Desa Wisata Rengganis di Desa Glingseran	65
4.2.1 Perencanaan	65
4.2.2 Pengorganisasian	73
4.2.3 Penyelenggaraan/Pelaksanaan	77
4.2.3 Pengawasan.....	87
4.3 Analisis Hasil Penelitian	88
4.3.1 Analisis Perencanaan	89
4.3.2 Analisis Pengorganisasian	91
4.3.3 Analisis Penyelenggaraan/Pelaksanaan	92
4.3.3 Analisis Pengawasan.....	95
BAB 5. PENUTUP	96

5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	103



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ranking Devisa Pariwisata Terhadap Komoditas Lainnya.....	1
Tabel 1.2 Data Kunjungan Wisatawan Perobjek Wisata di Kabupaten Bondowoso	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	54
Tabel 4.1 Kecamatan Kabupaten Bondowoso	56
Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa Glingseran.....	60
Tabel 4.3 Luas Wilayah Desa Glingseran.....	61
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Glingseran	62
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Dari Tingkat Pendidikan.....	62
Tabel 4.6 Mata Pencaharian Penduduk Desa Glingseran	63
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Yang Pengangguran	63
Tabel 4.8 Program Rencana Kerja Kelompok Sadar Wisata	72
Tabel 4.9 Bentuk Pelayanan Kepada Wisatawan.....	81
Tabel 4.10 Bentuk Kerjasama dengan Kelompok Sadar Wisata	82
Tabel 4.11 Fasilitas Penunjang Desa Wisata Rengganis	83
Tabel 4.12 Pembagian Hasil Retribusi Tiket dan Parkir.....	85
Tabel 4.13 Pendapatan Masyarakat Sebelum (2017) sesudah (2018) Adanya Pengelolaan Desa Wisata Rengganis	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peningkatan PDB Pariwisata.....	2
Gambar 2.1 Hubungan Antar Sektor.....	15
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif.....	51
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bondowoso	56
Gambar 4.2 Peta Wilayah Desa Glingseran.....	58
Gambar 4.3 Peta Pariwisata Kabupaten Bondowoso.....	61
Gambar 4.4 Majalah, Booklet, Brosur dan Media Sosial Kelompok Sadar Wisata.....	71
Gambar 4.5 Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Pedoman Wawancara
Lampiran II	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran III	: Dokumentasi Kepariwisataaan
Lampiran IV	: Surat Izin Penelitian dan Lembaga Penelitian Universitas Jember
Lampiran V	: Surat rekomendasi dari Bakesbangpol
Lampiran VI	: SK Kelompok Sadar Wisata
Lampiran VII	: Perjanjian tertulis lahan sawah menjadi tempat parkir
Lampiran VIII	: Daftar Pengunjung Pariwisata Kabupaten Bondowoso Tahun 2017-2018

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk mendukung roda perekonomian negara. Berbagai lokasi wisata dengan beragam budaya yang melekat kian menarik perhatian para pengunjung, baik wisatawan lokal maupun asing. Pariwisata juga merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Karena pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia. Menurut spillane 1987 dalam Murdyastuti et.al (2014:3) peranan pariwisata dalam pembangunan pada garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja) dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan-wisatawan asing).

Menghadapi tantangan bagi Indonesia untuk mencari sumber devisa alternative yang dikarenakan oleh beberapa persoalan yang mendesak seperti: semakin menipisnya sumber devisa dari minyak dan gas serta tambang dan hasil hutan, belum kompetitifnya produk industri Indonesia di pasar dunia, serta semakin sempitnya kesempatan untuk mendapatkan pinjaman luar negeri yang berbunga rendah, maka dari itu sektor pariwisata merupakan jawabannya (Sunaryo, 2013:120). Para pakar ekonomi memperkirakan sektor pariwisata akan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting pada abad ke-21 dalam perekonomian suatu negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu peran sektor pariwisata akan melebihi sektor migas serta industri lainnya. Sektor pariwisata sendiri merupakan penyumbang devisa negara terbesar keempat. Berikut merupakan tabel sumber-sumber devisa negara tahun 2015.

Tabel 1.1. Ranking Devisa Pariwisata Terhadap Komoditas Ekspor Lainnya

No	Komoditas	Devisa (Juta USD)
1	Minyak dan gas bumi	18,552.10
2	Batu bara	15,943.00
3	Minyak kelapa sawit	15,385.20
4	Pariwisata	12,225.89

Sumber : www.kemenpar.go.id

Pembangunan sektor pariwisata guna meningkatkan devisa dan wajib dilakukan karena ini merupakan langkah strategis untuk dilakukan, terlebih lagi Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk dijadikan wisata. Menurut Salah Wahab (1996:103) pada negara berkembang seperti Indonesia memiliki potensi pariwisata yang baik, pariwisata dapat dijadikan sebagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan likuiditas keuangan negara dalam waktu yang lebih singkat daripada sektor produksi lain seperti pertanian dan industri. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan menteri Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 menyatakan bahwa kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan. Berdasarkan data laporan kinerja kementerian pariwisata Indonesia pada tahun 2016 kondisi kepariwisataan nasional tahun 2016 secara makro menunjukkan perkembangan dan kontribusi yang terus meningkat dan semakin signifikan terhadap PDB nasional sebesar 4,03% atau senilai Rp 500,19 triliun, dengan peningkatan devisa yang dihasilkan mencapai Rp 176- 184 triliun dan tenaga kerja pariwisata sebanyak 12 juta orang. Pada kondisi mikro, juga ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 12,02 juta wisman dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 263,68 juta perjalanan. Berikut merupakan data peningkatan PDB nasional pariwisata dari tahun 2010-2016:

Gambar 1.1 Peningkatan PDB Pariwisata



Sumber: Laporan Kinerja Kemenpar 2016 diakses pada tanggal 15 Januari 2018

Dari data tersebut bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi besar bagi perekonomian di Indonesia dan setiap tahun semakin meningkat dan signifikan terhadap PDB nasional.

Munculnya kebijakan desentralisasi memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus segala potensi yang dimilikinya berdasarkan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya urusan pemerintahan dibagi menjadi 2 yaitu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam hal ini pariwisata merupakan bagian dari urusan pemerintah pilihan, sama dengan kelautan dan perikanan, pertanian dan kehutanan. Didesentralisasikannya urusan pariwisata, berarti daerah memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang pariwisata sesuai dengan potensi geografis yang dimilikinya. Termasuk Kabupaten Bondowoso yang memiliki potensi alam yang bisa dijadikan wisata.

Kabupaten Bondowoso adalah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur, secara geografis wilayah kabupaten terdiri dari pegunungan dan perbukitan seluas 44,4% daratan tinggi 24,9% yang merupakan daerah penghasil perkebunan, dan dataran rendah 30% dengan berbagai potensi produk hasil pertanian. Kabupaten Bondowoso juga merupakan satu satunya kabupaten yang tidak memiliki wilayah laut, akan tetapi banyak sekali potensi-potensi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Bondowoso terlebih lagi Bondowoso memiliki komoditas kopi dan beras organik atau pertanian organik yang menembus pasar ekspor menjadi produk unggulan serta banyaknya potensi wisata yang ada. Kondisi geografis Bondowoso dikelilingi gunung dengan hamparan hutan beserta segenap potensinya membuat Bondowoso semakin dikenal sebagai *The Highland Paradise*. Berikut merupakan data pengunjung wisata yg ada di kabupaten Bondowoso:

Tabel 1.2 Data Kunjungan Wisatawan Per Objek Wisata Kabupaten Bondowoso Tahun 2017

No	Nama Objek Wisata	Wisnus	Wisman
1	Kawah ijen	84880	41244
2	Kawah Wurung	31992	3365
3	Air Terjun Gentongan	3214	108
4	Patirana p28	28845	13
5	Pemandangan Arak-Arak	36436	282
6	Air Terjun Tancak Kembar	4653	52
7	Air Terjun Goa Tunggal	2920	-
8	Desa Wisata Almour	53375	10
9	Desa Wisata Lombok Kulon	5066	27
10	Pemandian Tasnan Baru	30226	3
11	Pemandian Air Hangat Blawan	8375	295
12	Pemandian Kelapa Gading	23350	-
13	Pemandian Kharisma	25123	-
14	Bosamba Rafting	399	-
15	River Tubing Tlogosari	1045	9
16	Museum Kereta Api	11240	116
17	Makam Ki Ronggi	4495	14
18	Padepokan Seni Gema Buana	2255	6
19	Batik Summersari	6263	-
20	Sumber Salak	473	-
21	Situs Pekauman	2206	51
22	Taman Rengganis dan Situs Glingseran	20582	10
23	Batu Soson Solor	12164	182
24	Situs Banyu Putih	434	35
25	Pendakian Gunung Raung	973	34
26	Event di Kb, Bondowoso	22.979	954

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa banyaknya wisata yang ada di kabupaten bondowoso serta diikuti dengan jumlah pengunjung yang banyak. ini membuktikan bahwa Kabupaten Bondowoso layak untuk dikunjungi wisatawan untuk berwisata.

Banyaknya wisata di Kabupaten Bondowoso harus di geluti dengan baik dalam pengelolaannya. Menurut ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir potensi wisata yang dimiliki Bondowoso sangat banyak, bahkan jika didata dengan cermat maka ada ratusan tempat wisata yang layak dijual kepada wisatawan. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada wisata di Bondowoso masih belum

sepenuhnya dikelola dengan baik. Sehingga yang dilakukan hanya sebatas pengenalan saja, tetapi secara ekonomis belum dilakukan secara maksimal. (Nusantara.news). Selain itu menurut Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso, Harry Patriantono mengungkapkan potensi wisata di Bondowoso tersebar di beberapa desa di 8 kecamatan, maka dari itu pihaknya fokus untuk mengembangkan pariwisata berbasis alam dan pedesaan (bangsaonline.com).

Adanya pariwisata mempunyai manfaat yang sangat luas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lingkungan. Pengembangan wisata perdesaan maupun desa wisata merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa, kegiatan ekonomi di desa akan meningkat dengan kedatangan para wisatawan, peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat pun otomatis terbuka. Dampak positif lainnya, masyarakat desa tidak tertarik lagi untuk pergi ke kota maupun luar kota dalam rangka mencari pekerjaan, karena berbagai peluang kerja dan kesempatan usaha makin terbuka lebar di desa seiring dengan berkembangnya kegiatan wisata tersebut. maka dari itu dengan adanya pembangunan desa wisata akan meningkatkan ekonomi kerakyatan terlebih lagi Kabupaten Bondowoso masih ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan presiden No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

Munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan terendah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berhak menggali dan mengelola potensi-potensi yang dimiliki, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Salah satu potensi yang ada di desa adalah memanfaatkan potensi alamnya untuk dijadikan sektor pariwisata. Sektor pariwisata bisa dibilang sangat potensial untuk dikembangkan di suatu desa

karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Besarnya peluang di sektor pariwisata membuat daerah bersama-sama membangun atau mengelola potensi wisata yang ada di sekitarnya, salah satunya adalah Desa Glingseran.

Peneliti fokus kepada desa wisata yang berada di desa glingseran kecamatan wringin Kabupaten Bondowoso. Desa Glingseran memiliki topografi di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 400m diatas permukaan laut dan luas wilayah 2.539.106 Ha. Potensi yang dimiliki Desa Glingseran sendiri yaitu panorama alam yang indah dan memiliki berbagai jenis batu megalitikum seperti batu dolmen dan sarkofagus, sehingga dikenal dengan situs Glingseran. Selain itu Desa Glingseran memiliki destinasi baru yaitu Desa Wisata Rengganis yang memanfaatkan potensi alamnya seperti adanya aliran sungai sehingga membentuk Air Terjun Sulaiman dan adanya pelataran berbatuan yang dikelilingi oleh hamparan sawah disulap menjadi Taman Rengganis. Sebelum menjadi tempat destinasi wisata, dulunya tempat tersebut biasa saja yang digunakan untuk mandi, cuci baju dan berjemur pakaian di batu-batuan dikarenakan tempat tersebut memiliki sumber mata air yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Sebelum dibentuknya menjadi destinasi wisata juga tempat tersebut sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat yang ada disekitar Desa Glingseran akan tetapi pemerintah Desa Glingseran dan masyarakat masih belum sadar untuk dijadikan sebagai objek wisata.

Desa Wisata Rengganis di Desa Glingseran sendiri diresmikan tanggal 9 April 2017. Wisata tersebut dibentuk bertumpu kepada alamnya yang mana dalam arti yang akan dijual kepada wisatawan merupakan wisata alam yang berada di pedesaan. Awal ditemukannya destinasi tersebut merupakan bagian dari penemuan oleh mahasiswa KKN Unej dalam pemetaan potensi desa. Karena memiliki daya tarik maka ditindaklanjuti oleh pemerintah Desa Glingseran untuk dikembangkan potensi tersebut menjadi objek wisata dikarenakan akan memberikan peluang kepada kesejahteraan masyarakat terutama Desa Glingseran. Selain Air Terjun Sulaeman dan Taman Rengganis didalamnya terdapat wahana seperti flying fox dan kolam renang anak. Terdapat juga watu kodok dan watu kendang (batu mirip kodok dan gendang), serta Air tirta suci Rengganis yang

diyakini oleh masyarakat sekitar dapat menyembuhkan penyakit serta membuat awet muda.

Konsepsi yang terbangun dalam pembentukan Desa Wisata Rengganis ini yaitu selain keindahan alam dengan hamparan persawahan terasering yang melatarbelakanginya tetapi juga didukung oleh faktor legenda/mitos yang berkembang dimasyarakat Desa Glingseran, yaitu sosok Dewi Rengganis. Dikukuhkannya Desa Glingseran sebagai desa wisata tentunya harus diimbangi dengan kemampuan mengelolanya desa wisata tersebut agar terus berkembang dan menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Desa Wisata Rengganis Tidak hanya dikelola oleh pemerintah Desa Glingseran saja yang dalam hal ini sebagai pemilik kewenangan yang dominan dalam mengelola wisata, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakatnya turut berpartisipasi dalam mengelola wisata tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata memberikan dampak positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa glingseran. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola desa wisata di desa Glingseran yaitu dengan membentuk dan menjadi bagian dari kelompok sadar wisata. maka dari itu sesuai dengan surat Keputusan Kepala Desa Glingseran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Pengurus kelembagaan Kelompok Sadar Wisata dibentuklah POKDARWIS “Dewi Rengganis”.

Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerah sesuai dengan unsur sadar wisata dan Sapta Pesona (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan). POKDARWIS sendiri merupakan bagian dari konsep *Community Based Tourism* yaitu pariwisata berbasis masyarakat/komunitas. Pengelolaan pariwisata melalui CBT yaitu konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial budayanya. CBT mengedepankan pendekatan *bottom-up* dalam pengelolaannya yang mengandung arti bahwa inisiatif untuk pengelolaan pariwisatanya berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Berbanding terbalik

dengan pendekatan *top-down* yaitu pengelolaan berasal dari pemerintah yang menimbulkan berbagai kritik pada kalangan masyarakat dikarenakan tidak mementingkan berbagai aspek seperti lingkungan, aspek sosial budaya dan aspek ekonomi.

Melihat permasalahan tentang pengelolaan pariwisata yang dianggap kurang menguntungkan masyarakat/komunitas sekitar wisata maka diperlukan pengelolaan pariwisata yang baik. Pengelolaan Pariwisata menurut Fandeli 1995 (dalam Azhari 2018), pengelolaan wisata sebagai suatu upaya untuk memanfaatkan tempat atau objek wisata dengan cara mengatur, membina dan memelihara obyek serta mengatur dan mengawasi pengunjung dengan organisasi pengelola yang ada. Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi tersebut antara lain, memanfaatkan tempat atau objek wisata; mengatur, membina dan memelihara objek wisata; mengatur dan mengawasi pengunjung; dan organisasi pengelola objek wisata. selain itu juga pengelolaan pariwisata yang baik tentunya harus melibatkan masyarakat, proses pengelolaan terdiri dari perencanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan, pengawasan dan adanya pemanfaatan hasil industri dari kegiatan pariwisata (Sunaryo 2013:142). Dalam hal ini masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengelola dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona desa wisata Rengganis di Desa Glingseran.

Pada pengelolaan desa wisata rengganis di desa Glingseran, pemerintah desa dan kelompok sadar wisata bersungguh-sungguh dalam mengelola potensi-potensi wisatanya ini dibuktikan dengan prestasi yang diraih yaitu penghargaan desa terbaik dalam pengelolaan potensi desa menjadi sebuah objek wisata, dan dinobatkan sebagai peraih wisatawan terbanyak pengunjung 2017. Namun disisi lain dalam pengelolaan desa wisata di Desa Glingseran masih memiliki beberapa kendala permasalahan, indikasi tersebut terlihat dengan adanya daya dukung pengelolaan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya tersedia dengan baik yaitu seperti akses jalan dari tempat parkir menuju ke objek wisata taman rengganis dengan melalui jalan setapak sehingga menyulitkan bagi pengunjung apabila bertemu lawan arah selain itu juga masyarakat masih belum memiliki

kesadaran, seperti masih ada yang mandi dan cuci baju di dekat area parkir menuju ketempat objek wisata dengan tempat yang agak terbuka. Fasilitas pendukung di objek wisata tersebut pun masih belum lengkap seperti tidak adanya toilet, padahal kita ketahui bahwa toilet adalah fasilitas penting bagi masyarakat saat berkunjung berwisata. Fasilitas yang tersedia di wisata desa rengganis di desa Glingseran adalah penunjuk jalan menuju wisata, area parkir motor, tempat sampah, gazebo dan warung menjual makanan dipelataran wisata.

Pelaksanaan kegiatan Desa Wisata Rengganis di Desa Glingseran dilakukan oleh POKDARWIS yang telah dibentuk berdasarkan tugas masing-masing anggota kepengurusan. Kegiatan kepengurusan juga berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab anggota kelompok sadar wisata. Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan masalah yang terjadi bukan hanya pada sarana dan prasarana pendukung wisata saja tetapi masalah juga terjadi di internal kepengurusan POKDARWIS “Dewi Rengganis”. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Bisnu selaku bendahara POKDARWIS bahwa dari 18 anggota kepengurusan pokdarwis hanya tersisa 5 saja yang aktif, namanya juga kelompok sadar wisata, yah harus sadar anggotanya dalam mengelola wisata (wawancara 8 Januari 2018). Dari hal tersebut mengakibatkan tugas dan tanggung jawab kepengurusan sepenuhnya belum berjalan dengan baik. Ini menjadikan pelaksanaan kegiatan desa wisata di Desa Glingseran menjadi tumpang tindih tidak berjalan dengan semestinya. Seperti jarang adanya penjagaan pada hari-hari biasa di pelataran wisata, penjagaan biasanya dilakukan pada hari sabtu, minggu dan tanggal merah, Penjagaan di tempat lokasi wisata sangat membantu mengarahkan pengunjung kesetiap objek dan menjaga keamanan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu pokja atraksi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan wahana *Flying Fox* tidak berjalan lagi dikarenakan anggota lebih memilih untuk bekerja di luar kota, dibutuhkan juga orang yang ahli memiliki syarat tertentu untuk menjalankan *Flying fox* tersebut demi keamanan pengunjung.

Perlu disadari bahwa pemerintah Desa Glingseran melalui kelompok sadar wisata “Dewi Rengganis” sebagai penggerak utama desa wisata rengganis yang

ada di Desa Glingseran harus memberikan langkah-langkah dan solusi yang tepat dari permasalahan yang ada dalam proses pengelolaan wisata di desa Glingseran. Pengelolaan berbasis kelompok sadar wisata pada dasarnya memiliki prinsip adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan. Proses pengelolaan sendiri terdiri dari perencanaan, penyelenggaraan/pelaksana, pengawasan dan pemanfaatan hasil dan terciptanya kesadaran masyarakat serta terwujudnya Sapta Pesona. Dari penjelasan latar belakang diatas yang diperoleh dari hasil penelitian sementara dilapangan, maka dari itu peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Desa Wisata Rengganis berbasis Kelompok Sadar Wisata Di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebuah penelitian dilakukan dalam upayanya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan/mencari solusi atas masalah yang timbul. Oleh karena itu, sebagai langkah awal perlu dipahami apa sebenarnya masalah itu. Masalah dapat digambarkan sebagai suatu perasaan keingintahuan, kegundahan dan kebingungan yang timbul akibat adanya ketidakjelasan atas suatu fenomena yang terjadi. Masalah ini menimbulkan pertanyaan mengapa masalah itu terjadi sekaligus menimbulkan keingintahuan peneliti terkait solusi bagi penyelesaian masalah tersebut. Menurut Silalahi (2012:44) masalah adalah perasaan tidak menyenangkan dan sulit atas suatu kondisi atau fenomena tertentu. Lebih lanjut lagi, masalah penelitian dapat muncul akibat adanya keingintahuan, keraguan, kesangsian, kebingungan atas adanya suatu fenomena.

Pengertian mengenai masalah di atas dan dipadukan dengan latar belakang yang dibangun peneliti untuk mengadakan penelitian ini menuntun peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut ini **“Bagaimana Pengelolaan Desa Wisata Rengganis berbasis Kelompok Sadar Wisata Di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso”?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Hal ini karena tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai atau jawaban atas rumusan penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) tujuan penelitian menyampaikan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan definisi dan pengertian tujuan penelitian di atas. Peneliti dapat menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya sebagai berikut ini “Mendesripsikan Pengelolaan Desa Wisata Rengganis berbasis Kelompok Sadar Wisata di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso”.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilaksanakan dalam upaya menjawab masalah penelitian yang mana jika jawaban atas pertanyaan tersebut tercapai dapat memberikan manfaat bagi lingkungan penelitian maupun bagi bahasan penelitian terkait. Kata lainnya, manfaat penelitian akan diperoleh jika tujuan dari penelitian tercapai. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) menjelaskan bahwa manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Sedangkan, Wardiyanta (2006:90) mengemukakan bahwa manfaat penelitian merupakan ungkapan atau harapan peneliti secara teoritis maupun secara praktis terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Manfaat teoritis penelitian mengemukakan bahwa penelitian memiliki manfaat bagi pengembangan teori. Sedangkan manfaat praktis penelitian menunjuk pada hasil penelitian akan berguna pada hal-hal yang bersifat praktis sesuai dengan bahasan penelitian.

Definisi-definisi mengenai manfaat penelitian di atas memberikan jalan bagi peneliti untuk merumuskan manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti yang meliputi:

a. Bagi Akademik

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi, wawasan dan pengetahuan secara konseptual mengenai kajian konsep pengelolaan dan konsep pariwisata berbasis masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan pemahaman bagi masyarakat luas tentang proses pengelolaan desa wisata berbasis kelompok sadar wisata

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran bagi instansi pemerintah yang terkait dan memberikan masukan bagi pihak-pihak pengelola baik pemerintah maupun organisasi terkait.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22) menyebutkan bahwa tinjauan pustaka memuat kajian teori dan konsep dasar yang berkaitan dengan masalah penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti serta kerangka berpikir yang dibangun dari teori dan konsep dalam tinjauan pustaka. Menurut Wardiyanta (2006:90) tinjauan pustaka berperan untuk menjelaskan posisi penelitian dalam peta penelitian. Pembangunan teori, konsep, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir dalam tinjauan pustaka akan membuat penelitian dapat dilakukan secara sistematis yang terbangun dari teori-teori terkait masalah yang dibahas dan terlepas dari pengulangan pembahasan dari sebuah permasalahan.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai tinjauan pustaka tersebut dapat ditarik benang merah bahwa tinjauan pustaka merupakan alat bagi seorang peneliti untuk menegaskan identitas dan originalitas penelitiannya dengan bertumpu pada teori-teori, konsep-konsep dan hasil penelitian terdahulu terkait topik penelitiannya serta kerangka berpikir peneliti dalam membangun konsep-konsep yang mendasari penelitiannya.

2.1 Konsep Dasar

Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berpikir peneliti. Wardiyanta (2006:9) mengemukakan bahwa dalam sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau antara abstraksi dengan realitas. Pandangan lain mengenai konsep yang dikemukakan oleh Silalahi (2012:112) adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Berdasarkan definisi mengenai konsep tersebut dapat ditarik benang merah bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosial yang terjadi yang dikonstruksi atas karakter-karakter mengenai suatu fenomena tertentu.

Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori-teori mengenai kegiatan publik yang terkait dalam pengelolaan desa wisata rengganis berbasis kelompok sadar wisata di desa glingseran kabupaten bondowoso yang meliputi:

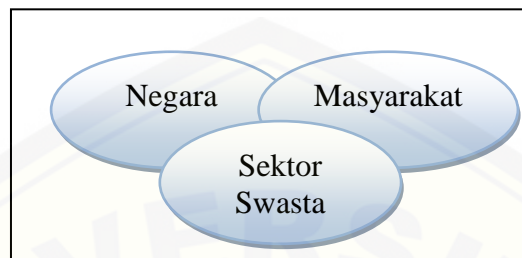
- a. *Good Governance*
- b. Otonomi
- c. Konsep pengelolaan pariwisata
- d. Konsep pariwisata
- e. Desa Wisata
- f. *Community Based Tourism*

2.2 Good Governance

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik pada penghujung tahun 1990-an. Dari segi *functional*, aspek *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. World Bank memberi definisi, yaitu *the ways state power is used in managing economic and sosial resources for development of society*. Sementara itu UNDP mendefinisikan sebagai *the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nations affair at all levels*. Oleh karena itu, menurut definisi terakhir ini, *governance* mempunyai tiga kaki yaitu economic, political dan administrative.

Economic governance meliputi proses pembuatan keputusan (*decision-making proceses*) yang memfasilitasi terhadap *equity, poverty dan quality or the life*. *Political governance* adalah proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. *Administrative governance* merupakan sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu, institusi dari *governance* meliputi tiga dominan, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan,

sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Berikut gambar hubungan antarsektor (Syafri, 2012:176-177).



Gambar 2.1 Hubungan antar sektor

Perkembangan ilmu administrasi membawa perubahan dari tatanan yang dulunya serba pemerintah (*government*) menjadi tatanan yang lebih luas dan biasa disebut dengan tata pemerintahan (*governance*). Secara bahasa, perbedaan ini memang tidak begitu mencolok namun dalam penyelenggaraan kenegaraan perubahan dari *government* ke *governance* memberikan arti yang begitu besar. *Government* merupakan julukan bagi lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu negara. *Government* biasa dikenal dengan sebutan serba pemerintah, artinya semua kegiatan pemerintahan dalam suatu negara diselenggarakan langsung oleh pemerintah. Sedangkan *governance* merupakan suatu kegiatan tata kelola pemerintahan yang tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah melainkan juga melibatkan unsur masyarakat dan lembaga non pemerintah.

Konsep *governance* ini muncul sebagai bentuk ketidakpuasan publik atas ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang disampaikan oleh Donald F. Kettl's dalam Frederickson (1997:80) bahwa peraturan pemerintah telah berubah. Pemerintah adalah produser yang rendah di bidang barang dan jasa dan lebih banyak dilakukan oleh supervisor penerima mandat (*Government's role has changed. Government is less producer of goods and services, and more the supervisor of proxies who do the actual work*). Oleh karena itu tatanan baru mengenai pemerintahan dianggap penting. *Governance* hadir menjawab tantangan itu, hal ini dikuatkan oleh Frederickson (1997:87) yang

menyebutkan bahwa *government* dan birokrasi mungkin dianggap rendah sedangkan *governance* dianggap lebih dapat diterima, sah, dan mungkin lebih baik. Hal ini karena administrasi publik tradisional terlihat hierarki, lambat, kurang imajinatif, sedangkan *governance* terlihat lebih kreatif dan tanggap.

Selain itu Peters (2001:14-15) menyebutkan bahwa munculnya konsep *governance* adalah karena hal berikut ini “*The concern over governance,.....That populist reaction against government has number dimensions.....This reaction to the public sector has been the more common one, with demands that government simply shrink. The dominant assumption is that government cannot do anything well so should do as little as possible*”. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Peters tersebut dapat dipahami bahwa konsep *governance* muncul karena adanya asumsi dominan bahwa pemerintah tidak dapat melaksanakan apapun yang sudah seharusnya menjadi tugasnya. Sehingga timbul reaksi terhadap sektor publik yang menjadi kesatuan bersama untuk menuntut penurunan peranan pemerintah.

Menurut Rosidi dan Fajriani (2013:3) perbedaan utama antara *government* dan *governance* adalah pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, administrasi dan ekonomi dalam pengelolaan kegiatan suatu negara. Konsep *government* menunjuk bahwa pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan kegiatan otoritas politik, administrasi dan ekonomi dalam pengelolaan kegiatan suatu negara. Sedangkan konsep *governance* mengandung arti bagaimana suatu bangsa yang terdiri dari berbagai pelaku-pelaku yang berkepentingan (*stakeholder*) yang pada dasarnya terdiri dari pemerintah, masyarakat serta lembaga nonpemerintah mendistribusikan kekuasaan, mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Osborn dan Gaebler dalam Rosidi dan Fajriani (2013:2) menyebutkan bahwa *governance* adalah sebuah proses pemecahan masalah bersama dan pemenuhan kebutuhan masyarakat (*the process in which we solve our problem collectively and meet the society need*). Sedangkan menurut Meuthia Ganie dan Rahman dalam Rosidi dan Fajriani (2013:2) *governance* merupakan suatu usaha kolektif antara negara dan sektor nonpemerintah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial. Definisi lain mengenai *governance* yang dirumuskan IIAS

dalam Rosidi dan Fajriani (2013:3) merupakan suatu proses di mana semua elemen dalam masyarakat menggalang kekuatan dan otoritas, mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan keputusan tentang kehidupan publik, pembangunan ekonomi dan sosial.

Definisi lain *governance* menurut Frederickson (1997:86) merupakan kumpulan berbagai institusi organisasi yang mana para pemimpin dan pembuat kebijakan dalam waktu yang sama melaksanakan implementasi kebijakan. Pekerjaan mereka dalam *governance* dibuat lebih bebas, lebih politis, lebih siap mengambil risiko, lebih kreatif dan pemberdayaan, serta lebih rendah dalam hal organisasional, hierarki, aturan terikat dan manajerial dari pada kerja administrasi publik tradisional.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai *governance* yang telah disampaikan di atas dapat ditarik benang merah bahwa dalam *governance* merupakan bentuk reformasi *government* atau reformasi administrasi publik tradisional yang semula hanya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang sangat hierarki, lambat, sarat akan aturan terikat, kurang kreatif serta kurang tanggap menjadi pelaksanaan administrasi publik yang pelaksanaannya lebih bebas dari aturan terikat, lebih kreatif, lebih siap mengambil risiko dan tanggap terhadap kepentingan publik dengan melibatkan usaha kolektif dari berbagai bentuk lembaga atau stakeholder yang terdiri dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga non pemerintah.

2.3 Otonomi

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat (Widjaja, 2005:17).

2.3.1 Otonomi Daerah

Penetapan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Selain itu tampak adanya upaya dari pemerintah untuk menyelenggarakan reformasi yang lebih memperhatikan daerah. perwujudan *good governance* yang diterjemahkan dalam desentralisasi yang telah dilaksanakan pemerintah republik Indonesia muncul karena dua alasan. Pertama, masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah sebagai akibat dari pola sistem pemerintahan masa lalu yang sentralistik. Kedua, desentralisasi sebagai jawaban dalam menjawab era baru dengan peraturan baru (Mardiasmo, 2002:3).

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja, 2001:76). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 1 butir 6 disebutkan bahwa:

“otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya jadi pada organisasi/administrative lembaga pemerintahan daerah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat (publik), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang.

Penyelenggaraan otonomi daerah juga diperkuat oleh meluasnya kewenangan daerah dalam pelaksanaan program ditingkat daerah. menurut Widjaja (2005:138) urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal prasarana lingkungan dasar,

mempertimbangkan dasar. Sementara itu, urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Jadi otonomi daerah adalah manifestasi dari keinginan untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. otonomi daerah dipandang penting karena otonomi merupakan kebutuhan hakiki dimana daerah memiliki keinginan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. otonomi daerah memberikan peluang untuk bersaing secara sehat dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga antar daerah.

Daerah memiliki hak dan dijamin pelaksanaannya untuk dapat mengelola dan memaksimalkan pembangunan didaerahnya dengan keunikannya masing-masing. Bagi daerah yang daya saingnya belum memadai untuk berkompetensi, maka pemerintah pusat berkewajiban memberikan dorongan dan support agar daerah tersebut mampu berkembang sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi sehingga mampu bersaing tingkatan persyaratan minimum.

2.3.2 Otonomi Desa

Desa juga memiliki otonomi tersendiri untuk mengelola pemerintahannya, sebagaimana telah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten desa menurut H,A,W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “otonomi desa” menyatakan bahwa:

“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usulyang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.” (Widjaja, 2003:3).

Perkembangan desa hingga saat ini terus mengalami pertumbuhan, adanya perubahan undang-undang maupun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya diatur pula desa. Perubahan ini diikuti oleh

regulasi lain yang mengatur tentang daerah. kemudian secara khusus disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Didalam undang-undang ini lebih diperjelas dan dipertegas bahwa kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang berada dalam wilayah pemerintahan desa setempat yang diakui sistem pemerintahan nasional dalam wilayah kabupaten. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan Desa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003:166).

Dalam menjalankan pemerintahan desa kewenangan yang timbul adalah kewenangan asli, kewenangan yang diberikan oleh kabupaten/kota, tugas pembantuann dan urusan pemerintah lain yang diserahkan didesa (Nurcholis, 2011:75). Adapun beberapa urusan yang dapat diserahkan oleh kabupaten/kota kepada desa menurut Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa antara lain yaitu bidang pariwisata. Jadi urusan pariwisata adalah kewenangan daerah yang dapat diserahkan kepada desa. Tentunya harus memperhatikan tentang potensi yang dimiliki desa. Dalam pelaksanaan otonomi desa, pemerintah desa dapat bekerjasama dengan masyarakat desa sendiri dalam pengelolaan pariwisata salah satunya melalui kelompok sadar wisata.

2.4 Konsep Pengelolaan Pariwisata

2.4.1 Pengelolaan

Pengelolaan atau manajemen berasal dari kata bahasa inggris “*management*” dengan kata asal *to manage* yang secara umum berarti mengelola. Menurut Herujitno (2001:1) pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat dipandang sebagai ilmu dan seni, manajemen sebagai ilmu artinya manajemen memenuhi kriteria ilmu dan metode keilmuan yang menekankan kepada konsep-konsep, teori prinsip dan teknik pengelolaan. Manajemen sebagai seni artinya kemampuan pengelolaan menciptakan sesuatu itu, secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja. Pengelolaan pekerjaan itu terdiri dari bermacam ragam, misalnya pengelolaan industri, pariwisata, pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial, olahraga, kesehatan, keilmuan dan lain-lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah pengelolaan memiliki pengertian yaitu sebagai berikut: “proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan”.

Menurut George R. Terry (dalam Syafii, 1999:4) manajemen merupakan sebuah proses yang khusus, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia yaitu:

a. Perencanaan

Menurut G.R Terry (dalam mulyono 2008:23) penyusunan langkah-langkah yang akan di tempuh dalam mencapai tujuan. merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaankegiatan yang dimaksud untuk mencapai tujuan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Henry Fayol (dalam Azwar 2010:15) di dalam pelaksanaan mencakup pengarahan, pengkoordinasian, bimbingan penggerakan dan pengawasan. Penggerakan menurut G.R Terry (dalam, Suprianto, 2015:164) adalah menggerakkan anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas dan antusias dan kemauan baik, dengan pengertian lain menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

c. Pengorganisasian

Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama dengan efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan

tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

d. Controlling

Pengendalian atau pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memantau, membuktikan dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diperintahkan dan dikondisikan sebelumnya dapat berjalan sesuai target .

Beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik benang merah bahwa pengelolaan merupakan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan terhadap potensi wisata pada dasarnya untuk menciptakan sapta pesona. Terciptanya Sapta Pesona sendiri diperlukan kesadaran dari berbagai pihak mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat. Berikut merupakan ketujuh unsur dari sapta pesona yang dicanangkan sebagai program pemerintah sejak 18 januari 1998 dalam keputusan menteri (Waluyo, dkk., 1995:37).

- a. Aman, sebagai suatu bentuk kondisi atau keadaan yang memberikan suasana tenang dan rasa tentram bagi wisatawan.
- b. Tertib, adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib dan teratur secara disiplin dalam semua kehidupan masyarakat.
- c. Bersih, suatu kondisi atau keadaan yang menampilkan sifat bersih dan sehat.
- d. Sejuk, menggambarkan suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang memberikan suasana segar dan nyaman.
- e. Indah, keadaan yang mencerminkan penataan yang teratur, tertib dan serasi sehingga memancarkan keindahan.
- f. Ramah tamah, merupakan sifat dan perilaku masyarakat yang akrab dalam pergaulan hormat dan sopan dalam berkomunikasi, suka senyum. Suka menyapa, suka memberikan pelayanan dan ringan kaki untuk membantu tanpa pamrih, baik yang diberikan oleh petugas/

aparatur unsur pemerintah maupun urusan pariwisata yang secara langsung melayani.

- g. Kenangan, bentuk kenyamanan yang baik dari segi lingkungan, pelayanan kamar, pelayanan makan minum maupun pelayanan-pelayanan lainnya.

2.4.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pariwisata

Menurut Bambang Sunaryo (2013:77) prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik pada intinya adalah koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipatif aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta atau industri pariwisata dan masyarakat setempat yang terkait. Secara teoritis pola manajemen dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraannya yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut ini:

- a. Partisipasi Masyarakat Terkait

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

- b. Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat Pariwisata), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi industri pariwisata, asosiasi bisnis, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.

- c. Kemitraan Kepemilikan Modal

Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Usaha fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, cinderamata, transportasi wisata dan sebagainya seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat melalui model kemitraan sinergis.

d. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara berlanjut, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui secara berlebihan. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan pembangunan kepariwisataan harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku.

e. Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat

Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara: pengunjung atau wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik. Misalnya, kerja sama dalam pengembangan atraksi wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen sampai pada pemasaran.

f. Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, sosial ekonomi dan budaya. Pengembangan dan pembangunan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada.

g. Monitor dan Evaluasi Program

Kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berlanjut mencakup mulai dari kegiatan penyusunan

pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan.

h. Akuntabilitas Lingkungan

Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat setempat yang tercemin dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada.

i. Pelatihan Pada Masyarakat Terkait

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan *profesional*.

j. Promosi Dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter *lansekap* (*sense of place*) dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan.

2.5 Konsep Pariwisata

2.5.1 Pengeritan Pariwisata

Secara etomologi menurut Yoeti (1996) dalam Suyadana dan Octavia (2015:30) istilah pariwisata sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki persamaan makna dengan *tour*, yang berarti berputar-putar dari suatu tempat ketempat lain. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kata “pariwisata” terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”.

- a. Pari, berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap.

b. Wisata, berarti perjalanan, berpergian.

Suwantoro (2004:3) dalam Anastasia et. Al (2014:35) mendefinisikan istilah pariwisata , yaitu suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang mengasihkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi keagamaan, dan keperluan usaha lainnya. Organisasi pariwisata dunia, UNWTO dalam Suryadana dan Octavia (2015:30) mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas perjalanan dan tinggal seseorang diluar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis, tujuan lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang dikunjunginya tersebut. Menurut Suwantoro (2001:3) pada hakekatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah.

Beberapa pengertian diatas dapat di tarik benang merah bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang melakukan perjalanan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan yang dapat mempengaruhi ekonomi, sosial, budaya dan politik serta dapat menarik dan menyambut turis-turis dan pengunjung lainnya serta dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan.

Kegiatan pariwisata memiliki subjek wisata yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata dan objek wisata yaitu tujuan wisatawan. Sebagai dasar untuk mengkaji dan memahami istilah-istilah kepariwisataan berpedoman pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 2) Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- 4) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
- 5) Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 6) Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

2.5.2 Jenis-Jenis Wisata

Menurut Suryadana dan Octavia (2015:32-33) wisata berdasarkan jenis-jenisnya dapat dibagi kedalam dua kategori sebagai berikut.

1. Wisata Alam
 - a. wisata pantai (*Marine tourism*), merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi makan dan minum.

- b. Wisata etnik (*etnik tourism*), merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
 - c. Wisata cagar alam (*Ecotourism*), merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat ditempat-tempat lain.
 - d. Wisata buru, merupakan wisata yang dilakukan dinegeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
 - e. Wisata agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan dan ladang pembibitan dimana wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman disekitarnya.
2. Wisata Sosial-Budaya

Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monument, wisata ini termasuk golongan budaya, monument nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya seperti tempat bekas pertempuran (*battle field*). Yang merupakan daya tarik wisata utama dibanyak negara. Museum dapat dikembangkan berdasarkan kepada temanya antara lain museum arkeologi, sejarah, etnologi, sejarah alam, sendi dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri ataupun dengan tema khusus lainnya.

2.5.3 Komponen-Komponen Wisata

Menurut Inskip (1991) dalam suryadana dan Octavia (2015:33-34), diberbagai macam literatur dimuat berbagai macam komponen wisata. Namun ada beberapa komponen yang selalu ada dan merupakan komponen dasar dari wisata. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Komponen-

komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Komponen tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Atraksi dan Kegiatan-Kegiatan Wisata

Kegiatan-kegiatan wisata yang dimaksud dapat berupa semua hal yang berhubungan dengan lingkungan alami, kebudayaan, keunikan suatu daerah dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan wisata yang menarik wisatawan untuk mengunjungi sebuah obyek wisata.

b. Akomodasi

Akomodasi yang dimaksud adalah berbagai macam hotel dan berbagai jenis fasilitas lain yang berhubungan dengan pelayanan untuk para wisatawan yang berniat untuk bermalam selama perjalanan wisata yang mereka lakukan.

c. Fasilitas dan Pelayanan Wisata

Fasilitas dan pelayanan wisata yang dimaksud adalah semua fasilitas yang dibutuhkan dalam perencanaan kawasan wisata. Fasilitas tersebut termasuk *tour and travel operations* (disebut juga pelayanan penyambutan). Fasilitas tersebut misalnya: restoran dan berbagai jenis tempat makan lainnya, toko-toko untuk menjual hasil kerajinan tangan, cinderamata, toko-toko khusus, toko kelontong, bank, tempat penukaran uang dan fasilitas pelayanan keuangan lainnya, kantor informasi wisata, pelayanan pribadi (seperti salon kecantikan), fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas keamanan umum (termasuk kantor polisi dan pemadam kebakaran), dan fasilitas perjalanan untuk masuk dan keluar (seperti kantor imigrasi dan bea cukai).

d. Fasilitas dan Transportasi Lain

Meliputi transportasi akses dari dan menuju kawasan wisata, transportasi internal yang menghubungkan atraksi utama kawasan wisata dan kawasan pembangunan, termasuk semua jenis fasilitas dan pelayanan yang berhubungan dengan transportasi darat, air dan udara.

e. Infrastruktur Lain

Infrastruktur yang dimaksud adalah penyediaan air bersih, listrik, drainase, saluran air kotor, telekomunikasi (seperti telepon telegram, telex, faksimili, dan radio).

f. Elemen Kelembagaan

Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan yang diperlukan untuk membangun dan mengelola kegiatan wisata, termasuk perencanaan tenaga kerja dan program pendidikan dan pelatihan menyusun strategi marketing dan program promosi; menstrukturisasi organisasi wisata sektor umum dan swasta; peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan wisata; menentukan kebijakan penanaman modal bagi sektor publik dan swasta; mengendalikan program ekonomi, lingkungan dan sosial kebudayaan.

Dewasa ini terjadinya pergeseran orientasi pariwisata, dari wisata konvensional menuju wisata alternatif atau wisata minat khusus dengan pola wisata yang menekankan kepada aspek penghayatan dan penghargaan lebih terhadap pesona Indonesia oleh komunitas-komunitas masyarakat di sekitar obyek dengan daya tarik wisata (ODTW) berupa keindahan alam, keanekaragaman seni, budaya dan adat istiadat masyarakat yang dikelola secara ramah. Salah satu program wisata besutan pemerintah yang mengarah pada pengembangan wisata minat khusus dan ramah yaitu dengan dipopulerkannya konsep desa wisata.

2.6 Desa Wisata

Program desa wisata yang dibentuk pemerintah secara langsung telah mampu melibatkan masyarakat dalam aktivitas pariwisata. Desa wisata memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengelola kampung halamannya sesuai dengan keotentikan desa. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 4 bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya serta memperkenalkan budaya. Adanya kepedulian bersama antara pemerintah serta pihak yang terkait dalam

mengembangkan desa wisata dirasa akan mampu merangsang perekonomian masyarakat. Kepedulian pemerintah dengan kebijakan yang proaktif terhadap desa wisata diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia khususnya bagi masyarakat pedesaan.

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, Wiendhu. *Concept, Prespective and Challenges*, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal.2-3), terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata:

- a. Akomodasi: sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
- b. Atraksi: seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintregasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti: kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Menurut Priasukmana dan Mulyadin (2001), penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi;
2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda makanan lokal dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata;
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang kedesaanya;
4. Keamanan didesa tersebut terjamin;
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi dan tenaga kerja yang memadai;
6. Beriklim sejuk dan dingin;
7. Berhubungan dengan objek wisata yang lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Desa wisata memiliki 3 karakteristik utama dari objek wisata yang harus diperhatikan dalam upaya pengembangan suatu objek wisata agar menarik dan

dikunjungi banyak wisatawan. Seperti yang diungkapkan Drs.Oka A. Yoeti, 1985, karakteristik tersebut antara lain:

- a. Daerah itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai “*something to see*” artinya ditempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. Dengan kata lain, daerah itu harus mempunyai daya tarik yang khusus dan unik.
- b. Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah ‘*something to do*’. Artinya di tempat tersebut selain banyak yang dapat disaksikan, harus disediakan pula fasilitas rekreasi atau amusement yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lebih lama ditempat itu.
- c. Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah “*something to buy*” artinya ditempat tersebut harus ada fasilitas untuk berbelanja, terutama barang-barang souvenir dan kerajinan tangan rakyat sebagai oleh-oleh dibawa pulang.

Berdasarkan perkembangannya desa wisata dibagi menjadi tiga kategori. Dalam buku panduan pengembangan Desa Wisata Hijau, kategori tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Desa Wisata Embrio
Desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dan sudah ada gerakan masyarakat/ desa untuk mengelolanya menjadi desa wisata.
- b. Desa Wisata Berkembang
Desa wisata berkembang yang sudah dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, sudah ada swadaya masyarakat/ desa untuk pengelolaannya, sudah mulai promosi dan sudah ada wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung.
- c. Desa Wisata Maju
Desa wisata yang sudah berkembang dengan adanya wisatawan secara kontinu dan dikelola secara profesional dengan terbentuk forum pengelola serta sudah mampu melakukan promosi dan pemasaran dengan baik.

2.7 *Community Based Tourism (Pariwisata Berbasis Masyarakat)*

Menurut Prasiasa (2011:95) pariwisata berbasis masyarakat merupakan sebuah pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang sangat berbeda dengan pendekatan konvensional yang selama ini dijalankan, yaitu dengan sistem *top-down* dan sentralistik. Pendekatan pembangunan pariwisata dengan sistem *top-down* ini banyak membatasi ide-ide yang ada didalam masyarakat, khususnya yang terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan produk wisata.

Secara prinsipial, CBT berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri atas dua prespektif; yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari pembangunan pariwisata. Oleh karena itu pada dasarnya terdapat 3 (tiga) prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat (CBT), yaitu:

- 1) Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan,
- 2) Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan, dan
- 3) Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal.

Menurut Sunaryo (2013:142) definisi apapun yang dipakai, pada prinsipnya paradigma kepariwisataan berbasis masyarakat sangat mengharapkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian sampai dengan pemanfaatan hasil dari industri kepariwisataan. Pemanfaatan hasil berkaitan dengan dampak positif sosial-ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berdomisili disekitar destinasi wisata.

Menurut Hausler (dalam Sunaryo, 2013:139) kepariwisataan berbasis masyarakat pada hakekatnya merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal, baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak, dalam bentuk pemberian akses pada manajemen dan sistem pembangunan yang berujung pada

pemberdayaan politis melalui kehidupan yang lebih demokratis, termasuk dalam pembagian keuntungan dari kegiatan kepariwisataan secara lebih adil bagi masyarakat lokal. Keunggulan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat/komunitas dalam mensejahterakan rakyat menurut Murdyastuti et. Al (2014, 90) yaitu;

- 1) Unit –unit usaha pariwisata pada umumnya berskala kecil menengah. Hal ini lebih sesuai dengan kapasitas manajemen masyarakat yang mengelola sumberdaya lokal.
- 2) Pariwisata berbasis masyarakat/komunitas efektif membuka peluang kerja dan berusaha bagi warga miskin didestinasikan pariwisata.
- 3) Karena sangat tergantung pada konservasi alam, pariwisata berbasis masyarakat/komunitas mampu mencegah degradasi mutu lingkungan.
- 4) Pariwisata berbasis masyarakat/komunitas membuka ruang lebar bagi harmoni sosial dan efektif meminimalkan dampak sosial dan budaya yang negatif.
- 5) Karena didasarkan pada dukungan sumberdaya lokal, pariwisata berbasis masyarakat/komunitas menjadi media yang tepat untuk memberdayakan masyarakat.
- 6) Pariwisata berbasis masyarakat/komunitas memposisikan masyarakat sebagai partisipan aktif dalam pengembangan pariwisata.

Menurut Suansri (dalam Sunaryo 2013:142) menyatakan, pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat (CBT) meliputi 5 dimensi pengembangan yang merupakan aspek utama pembangunan kepariwisataan sebagai berikut:

- 1) Dimensi Ekonomi; dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan disektor pariwisata, berkembangnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.
- 2) Dimensi Sosial; dengan indikator meningkatnya kualitas, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran gender yang adil antara laki-laki dan perempuan, generasi muda dan tua, serta memperkuat organisasi komunitas.

- 3) Dimensi Budaya; dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati nilai dan budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, berkembangnya nilai budaya pembangunan yang melekat erat dalam kebudayaan setempat.
- 4) Dimensi Lingkungan; dengan indikator terjaganya daya dukung lingkungan, adanya system pengelolaan sampah yang baik, meningkatnya kepedulian akan perlunya konservasi dan perservasi lingkungan.
- 5) Dimensi Politik; dengan indikator meningkatkan partisipasi penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, dan adanya jaminan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan SDA.

Sementara itu para pakar *Community Based Tourism* Yaman & Mohd (dalam Sunaryo, 2013:144) menekankan beberapa kunci penting yang bisa digunakan dalam pengelolaan pembangunan kepariwisataan yang menggunakan pendekatan *Community Based Tourism*, yaitu diantaranya:

- 1) Adanya dukungan fasilitas dari pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, coordinator maupun badan regulasi pengelolaan SDM dan penguatan kelembagaan.
- 2) Adanya partisipasi aktif dari *stakeholder*, karena *Community Based Tourism* secara umum bertujuan untuk penganekaragaman industri kepariwisataan yang tumbuh dari masyarakat. Oleh karena itu keseluruhan anggota masyarakat dengan kemampuan kewirausahaannya dapat menentukan/membuat kontak bisnis dengan *tour operator*, *travel agent* untuk memulai bisnis baru.
- 3) Pembagian keuntungan yang adil, baik keuntungan langsung yang diterima masyarakat yang memiliki usaha di sektor pariwisata maupun keuntungan tidak langsung yang dapat dinikmati masyarakat yang tidak memiliki usaha kepariwisataan.
- 4) Penggunaan sumberdaya lokal secara berkesinambungan yang dimiliki dan dikelola oleh seluruh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, termasuk yang tidak memiliki sumberdaya keuangan. Hal

ini bisa menumbuhkan kepedulian, penghargaan diri sendiri, dan kebanggaan identitas pada seluruh anggota masyarakat.

- 5) Penguatan institusi lokal yang bertujuan mengatur hubungan antara penduduk, sumber daya, dan pengunjung. Yang paling baik adalah terbentuknya lembaga sosial dengan kepemimpinan yang dapat diterima oleh semua anggota masyarakat. Penguatan kelembagaan bisa dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan individu dengan keterampilan kerja yang diperlukan (teknik, managerial, komunikasi, pengalaman kewirausahaan dan pengalaman organisasi).
- 6) Adanya keterkaitan antara koordinasi yang efektif antara level regional dan nasional. Hal ini sangat strategis sebab komunitas lokal seringkali kurang dapat mengakses link langsung kepasar nasional atau internasional sehingga manfaat kepariwisataan tidak sampai dinikmati level masyarakat.

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat ditarik benang merah bahwa pariwisata berbasis masyarakat merupakan pengelolaan kepariwisataan dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang terbentuk dalam komunitas lokal mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian sampai dengan pemanfaatan hasil kepariwisataan. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penyelenggaraan dapat diartikan sebagai pelaksana yang didalamnya termasuk pengarahannya, pengkoordinasian, bimbingan penggerakan dan pengawasan. Pemanfaatan hasil berkaitan dengan dampak positif yang diperoleh masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan meliputi dampak sosial-ekonomi masyarakat sekitar lokasi pariwisata. Komunitas lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok sadar wisata “Dewi Rengganis”.

2.8 Penelitian Terdahulu

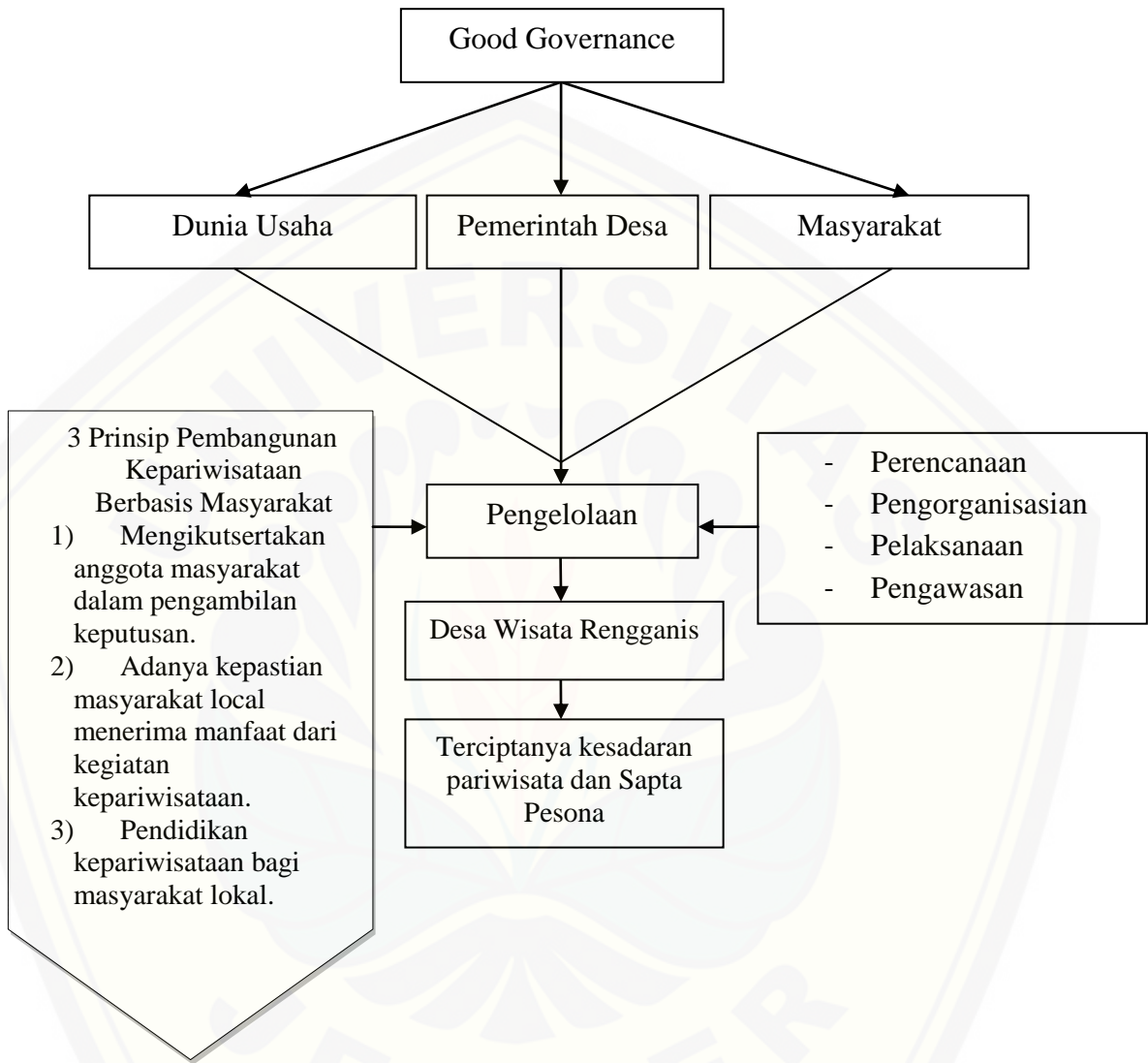
Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Sugi Rahayu, M.Pd., Msi	Dimas Kurnia Purmada
Judul	Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengelolaan Desa Wisata Dalam Prespektif <i>Community Based Tourism</i> (Studi Kasus Pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)
Jenis Penelitian	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif
Hasil Penelitian	Dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata dikabupaten Kulon Progo dilakukan melalui: 1)program pengembangan pariwisata, 2) pengembangan pemasaran pariwisata dan 3) pengembangan kemitraan pariwisata. Namun demikian, dalam pengembangan pariwisata dan khususnya CBT memiliki kendala yaitu : 1)sumber dana tidak mencukupi, 2) kurangnya SDM dibidang pengembangan pariwisata, 3) kurangnya kesadaran masyarakat, dan 4) dukungan pihak ketiga yang masih minim	1) pengelolaan desa wisata Gubugklakah dilaksanakan melalui pengelolaan pariwisata, pemasaran pengelolaan sumberdaya manusia dan manajemen krisis. 2)penerapan <i>Community Based Tourism</i> dalam pengelolaan desa wisata Gubugklakah dapat dilihat melalui beberapa hal seperti memastikan keikutsertaan anggota dalam setiap kegiatan pariwisata, pelestarian alam dan budaya dan menjamin adanya pemerataan pendapatan masyarakat. 3)tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkatan <i>Citizen Control</i>
Persamaan dengan penelitian	1. Menggunakan metode deskriptif kualitatif	1. Menggunakan metode deskriptif kualitatif
Perbedaan dengan penelitian	1. Tempat penelitian 2. Penelitian menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan (Research and	1. Tempat Penelitian 2. Penerapan CBT di kawasan wisata pantai clungup, dimensi pengelolaan pariwisata berbasis

Development) yang dikembangkan oleh Borg and Gall	CBT, tantangan-tantangan yang ada dalam penerapan CBT bagi kelompok.
3. Teori yang digunakan	3. Teori yang digunakan



2.9 Kerangka Berfikir



BAB 3. METODE PENELITIAN

Silalahi (2012:6) menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dianggap reliabel dan efisien karena pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui metode ilmiah tersebut dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka baik oleh diri sendiri peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Definisi mengenai metode oleh Usman dan Akbar (2009:41) adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22) metode penelitian merupakan penggunaan aspek epistemologi yang diterangkan dalam bab tersendiri secara terperinci dan jelas. Berdasarkan definisi mengenai metode dan metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara yang dapat ditempuh oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dengan langkah-langkah sistematis.

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Jika diibaratkan masalah penelitian adalah daging yang akan dipotong maka kita memerlukan alat untuk memotong daging tersebut, maka dari berbagai jenis alat yang dapat digunakan untuk memotong seperti silet, pisau gergaji maka alat yang paling tepat adalah pisau yang tajam. Begitu pula dengan penelitian, seorang peneliti harus menggunakan metode penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukannya. Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) untuk metode penelitian kualitatif, komponen yang diperlukan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Penelitian
- b. Tempat dan Waktu penelitian
- c. Data dan Sumber data
- d. Penentuan informan penelitian

- e. Teknik dan Alat pengumpulan data
- f. Teknik menguji keabsahan data
- g. Teknik penyajian dan Analisis data

3.1 Jenis Penelitian

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mengemukakan jenis penelitian sebagai penegasan kategori penelitian yang akan dilakukan. Silalahi (2012:22) mengemukakan bahwa tidak ada penelitian yang hanya menggunakan satu jenis penelitian tunggal. Jenis penelitian pun beragam menurut klasifikasi jenis penelitian dari para ahli metodologi penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Usman dan Akbar (2009:4), penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Arikunto dalam Prastowo (2012:111) menjelaskan pula bahwa metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek penelitian. Sesuai definisi tersebut, penelitian ini dilakukan bukan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil pelaksanaan kolaborasi pengembangan destinasi pariwisata Pulomerah.

Moleong (2014:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif seperti yang dikemukakan Silalahi (2012:38) bahwa penelitian kualitatif kecenderungan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Penelitian ini mendeskripsikan Bagaimana Pengelolaan Desa Wisata Rengganis berbasis Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Di Desa Glingseran Kecamatan

Wringin Kabupaten Bondowoso secara sistematis, faktual, holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Bagian subbagian ini akan dipaparkan dimana penelitian tersebut dilaksanakan dan kapan penelitian dimulai serta berakhir menyelesaikan penelitian tersebut. Tempat dan waktu penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu dari variable-variabel yang dieliti. Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2016:52), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis dalam penentuan (pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian.

Tempat penelitian merupakan lokasi atau daerah yang diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di objek desa wisata rengganis di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso yang nantinya dapat mewakili gagasan yang hendak disampaikan oleh peneliti serta sebagai lokasi bagi peneliti untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih tiga bulan dimulai dari bulan 16 Juli hingga 16 September 2018 dengan melakukan pengamatan dan pencarian data di lokasi-lokasi yang telah dipilih sebagai lokasi penelitian. Namun tidak menutup kemungkinan adanya tambahan waktu penelitian jika nanti masih ada data yang dibutuhkan.

3.3 Data dan Sumber Data

Data memegang peranan penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya sehingga mampu menjawab masalah penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) data adalah himpunan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka maupun deskripsi yang berasal dari sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:284) menjelaskan, “Data Kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yang meliputi:

a. Data Primer

Sumber Primer sumber data yang langsung memerikan data kepada pengumpul data. Data primer sangat penting dalam penelitian karena merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Berdasarkan pengertian tersebut data primer dalam penelitian ini yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan pada kegiatan pengelolaan Desa Wisata Rengganis, sedangkan wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Desa Wisata Rengganis. Berikut merupakan daftar sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini.

1. Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa
 - Gambaran umum Desa Glingseran
 - Potensi yang ada di Desa Glingseran
 - Dibentuknya desa wisata di Desa Glingseran
 - Siapa saja yang mengelola dan terlibat pengelolaan Desa Wisata Rengganis

- Kerja sama dalam mengelola Desa Wisata Rengganis
 - Bentuk pengawasan yang dilakukan
 - Hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan desa wisata
2. Informasi yang diperoleh dari Bidang Pariwisata
 - Gambaran umum pariwisata di Kabupaten Bondowoso
 - Proses agenda hingga menjadi destinasi wisata di Desa Glingseran
 - Siapa saja yang terlibat dalam pembentukan Desa Wisata Rengganis
 - Peran dan keterlibatan Disparpora Kabupaten Bondowoso
 - Bentuk promosi yang dilakukan Disparpora Kabupaten Bondowoso
 3. Informasi yang diperoleh dari Kelompok Sadar Wisata
 - Gagasan atau ide awal dibentuknya Desa Wisata Rengganis
 - Peran masyarakat dan Pemerintah dalam pengambilan keputusan
 - Proses pembentukan organisasi pengelola
 - Fasilitas sarana dan prasarana yang ada
 - Kontribusi masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan
 - Kerjasama yang dilakukan dalam mengelola Desa Wisata Rengganis
 - Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pengelola
 - Hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan desa wisata
 4. Informasi yang diperoleh dari masyarakat
 - Pengaruh adanya Desa Wisata Rengganis terhadap kehidupan masyarakat
 - Pemanfaatan hasil yang diterima dengan adanya Desa Wisata Rengganis
 - Keikutsertaan masyarakat dalam mengelola Desa Wisata Rengganis
 5. Informasi yang diperoleh dari pengunjung

- Pelayanan yang diberikan pihak pengelola
- Sarana dan prasarana yang ada di Desa Wisata Rengganis
- Kesan pesan yang didapatkan saat mengunjungi Desa Wisata Rengganis
- Saran dan masukan terhadap pengelola

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data yang telah terbentuk dalam dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Data sekunder dapat berupa dokumen, catatan, laporan, majalah ilmiah, makalah, karya tulis ilmiah, dan sebagainya.

Data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan. Begitu pula pada keadaan semestinya yaitu sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat dalam Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang meliputi data kunjungan tahun 2017-2018, SK kepengurusan Kelompok Sadar Wisata serta Foto-foto terkait wawancara dan foto-foto yang terkait dengan pengelolaan desa wisata.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Penelitian kualitatif memposisikan manusia sebagai instrument utama penelitian. Informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:221) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
2. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
3. Orang yang memiliki waktu memadai untuk dimintai informasi.
4. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
5. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dengan teknik *Snowball sampling*. Menurut Silalahi (2012:272) *Snowball Sampling* merupakan prosedur pemilihan informan secara bertahap. Langkah pertama ditentukan orang yang dianggap mampu memberikan informasi terkait masalah yang dikaji dan menjadikan orang tersebut sebagai *Key Informant* yang mampu memberikan gambaran siapa saja yang layak menjadi informan selanjutnya. Berdasarkan definisi dan keterangan terkait informan penelitian di atas, peneliti menentukan sejumlah kunci informan penelitian yang dinilai peneliti memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat dimintai informasi terkait topik penelitian Pengelolaan Desa Wisata Rengganis Berbasis Kelompok Sadar Wisata Di Desa Glingseran yakni;

- a. Kepala Desa Glingseran, Bapak Sulaedi. (*Key Informant*)
- b. Kelompok Sadar Wisata
 - Bapak M. Abdahu
 - Ibu Desy
 - Bapak Bisnu
 - Bapak Zainullah
- c. Masyarakat Desa Glingseran
 - Bapak Moawi
 - Ibu Iren
 - Bapak Dafa
- d. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso

- Bapak Ahmad Eko Wicaksono, SPd (Staff Promosi dan ekonomi kreatif)
 - Bapak Junaidi (Staff Obyek Daya Tarik Wisata)
- e. Pengunjung, Mba Fida
- f. Informan tambahan jika diperlukan.

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan hak utama untuk mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24), teknik dan alat perolehan data ialah uraian yang menjelaskan cara dan instrument yang digunakan untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara survei, angket atau pengukuran. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, draf wawancara, kuisioner atau alat elektronik. Teknik dan alat pengumpulan digunakan dalam penelitian untuk menggali data-data relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai teknik pengumpulan tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang akan dijabarkan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a) Wawancara (*interview*)

Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti. Menurut Usman dan Akbar (2009:55) manfaat penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya serta untuk mengkaji

data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data lainnya. Dalam proses wawancara memerlukan beberapa alat penunjang guna membantu untuk mencatat dan merekam penjelasan dari responden atau informan apabila daya ingat dari peneliti kurang baik.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan untuk menggali informasi tentang pengelolaan desa wisata rengganis berbasis kelompok sadar wisata dan informasi tentang kelebihan atau kelemahan yang mungkin terdapat dalam pengelolaan tersebut. Pemilihan narasumber dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan informasi penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti draft wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

b) Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2009:52) observasi merupakan usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan teknik observasi membutuhkan kecermatan dan daya ingat yang kuat dalam pengamatan sehingga diperoleh data-data yang relevan. Untuk membantu teknik observasi ini Usman dan Akbar (2009:54) menyebutkan diperlukannya alat bantu observasi yaitu daftar riwayat kelakuan, catatan berkala, daftar catatan, alat elektronik seperti kamera dan alat perekam. Jenis-jenis teknik observasi sendiri menurut Usman dan Akbar (2009:54) terdiri dari tiga yaitu:

- a. partisipasi atau lawannya nonpartisipasi;
- b. sistematis atau lawannya nonsistematis; dan
- c. eksperimental atau lawannya noneksperimental.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipasi. Pengertian teknik observasi non-partisipasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang *observer* tidak terlibat

langsung dengan objek yang diteliti. Peneliti dalam penelitian ini mengamati secara langsung pengelolaan desa wisata rengganis berbasis Kelompok Sadar Wisata di Desa Glingseran.

c) Dokumentasi

Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2009:69) merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk sekunder. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moelong (2014:217) adalah untuk menguji, menafsirka dan bahkan untuk meramalkan. Guba dan Lincoln (dalam Moelong, 2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

- a. Dokumen merupakan sumberdaya yang stabil, kaya dan mendorong;
- b. Berguna sebagai satu bukti untuk penelitian; dan
- c. Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks,

Penelitian ini memerlukan beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi Perdes tentang desa wisata, SK kepengurusan POKDARWIS, data kunjungan wisata, foto-foto terkait wawancara dan foto-foto yang terkait dengan pengelolaan pariwisata.

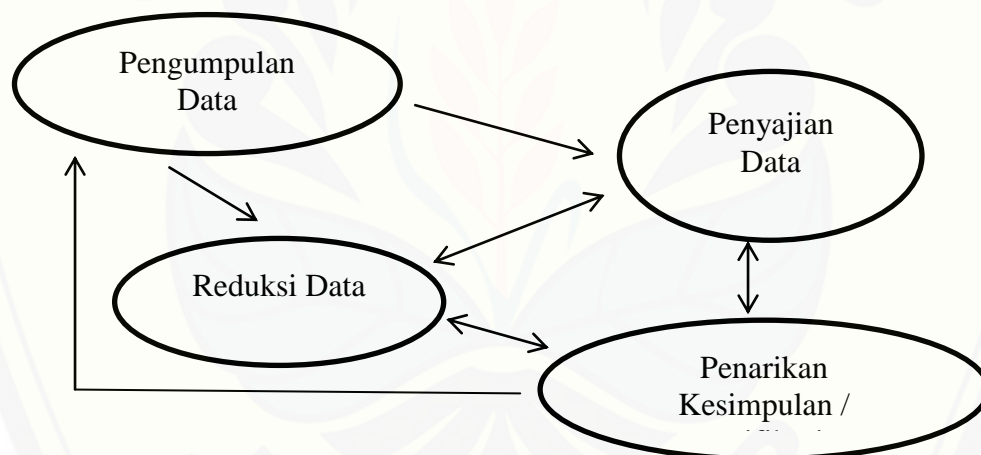
3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Teknik penyajian (*display*) menurut Usman dan Akbar (2009:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut. Sedangkan menurut Wardiyanta (2006:37) analisis data merupakan upaya penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan

diinterpretasikan. Secara umum teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Penggolongan teknis analisis data ini dilakukan berdasarkan data yang menjadi bahan analisis dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Memperhatikan definisi analisis data diatas, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2015:246), megemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berslangung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles da Huberman aktifitas dalm analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusiondrawing/verification*.

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif



Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiono (2015:247)

A. Data Reduction (Reduksi Data)

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Menurut Sugiono (2015:247) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari yang diperlukan.

Sedangkan menurut Silalahi (2012:304) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data terhadap hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti yaitu selama proses pengumpulan data.

B. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2015:249) yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2015:249) selanjutnya disarankan dalam melakukan display data selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Peneliti dalam penelitian ini menyajikan data dalam bentuk uraian kata-kata atau narasi, bagan, flowchart, table dan gambar. Hal tersebut dilakukan agar peneliti maupun pembaca dapat memahami informasi secara mudah dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

C. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan semua langkah-langkah analisis data dari Miles dan Huberman, diantaranya Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi data. Setelah data terinterpretasi maka peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber sebagai teknik analisis data.

3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisah dari penelitian kualitatif. Hal ini karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan Moeloeng (2014:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Dalam teknik pemeriksaan data ini terdapat empat kriteria dan sepuluh pemeriksaan, sebagaimana tertera pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Kriteria dan teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
<i>Kredibilitas</i> (derajat kepercayaan)	Perpanjangan keikutsertaan Ketekunan pengamatan Triangulasi Pengecekan sejawat Kecukupan referensial Kajian kasus negatif Pengecekan anggota
<i>Transferability</i> (keteralihan)	8. Uraian rinci
<i>Auditability</i> (kebergantungan)	9. Audit kebergantungan
<i>Confirmability</i> (kepastian)	10. Audit kepastian

Sumber : Moeloeng (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik yang dipaparkan pada tabel diatas. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang dirasa tepat untuk diterapkan yaitu sebagai berikut.

1. Ketekunan Pengamatan

Peneliti merupakan instrument dalam penelitian jika menggunakan metode kualitatif. Oleh karena itu, seorang peneliti dituntut untuk tekun dalam pengumpulan dan analisis data. Sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh sekaligus hasil analisisnya. Menurut Meolong (2014: 330) seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang kemudian di analisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami.

2. Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moleong (2014:332) sebagai berikut ini:

- a. mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. mengecek dengan berbagai sumber data; dan
- c. memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mencocokkan data-data yang diperoleh. Seperti mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara salah satu informan dengan data yang diperoleh dari informan lain, atau mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi maupun hasil dokumentasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengurus kelompok sadar wisata sebaiknya berkoordinasi secara jelas dalam melakukan pembagian tugas dan melakukan pelaporan ketika rapat yang dilakukan.
2. Perlu adanya pembinaan secara insentif dari pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso Terhadap Kelompok Sadar wisata dalam menjalankan tugas sesuai struktur organisasi dan rencana kerja yang telah di rencanakan terlebih lagi wisata dan Pokdarwis baru dibentuk.
3. Pengurus tentunya selalu melibatkan masyarakat dalam monitoring maupun evaluasi kegiatan pengelolaan Desa Wisata Rengganis.
4. Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang Desa Wisata Rengganis agar kegiatan pengelolaan berjalan dengan baik. Penetapan regulasi menjadi point penting sebagai legalitas dan landasan. Selain itu juga sebagai bentuk perhatian pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan pengelolaan tersebut.
5. Pengelolaan Desa Wisata Rengganis seharusnya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terutama investor, adanya investor untuk mengembangkan Desa Wisata Rengganis agar selalu ada pembaharuan sehingga memiliki daya tarik bagi pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Azwar, Azrul. 2010. *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Tangerang: BinaRupa Aksara
- Frederickson, H. George. 1997. *The Spirit of Public administration*. California: Jossey-Bass Inc.
- Hardinoto, Kusudianto. 1996. *Perencanaan Pengembangan destinasi Pariwisata*. Jakarta: UI-Press.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi Dan Organisasi pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Murdyastuti, Rohman, dan Suji. 2014. *Kebijakan pengembangan pariwisata berbasis Democratic Governance*. Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pitana, I Gde dan Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Prasiasa, D.P Oka. 2011. *Wacana Kontemporer Pariwisata*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryadana M.L dan Vanny, Octavia 2015. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Suwantoro, Gamal. 2001. *Dasar-dasar Pariwisata*. Edisi ketiga. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Erlangga
- Thoha, Mifta. 2008. *Ilmu Administrasi Publik kontemporer*. Jakarta: Alfabeta.
- Usman, H. dan Purnomo S. Akbar 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi ketiga. Jakarta: Kencana.
- Wahab, Salah 1996. *Management Kepariwisataaan*. Jakarta: PT Pradnya Pramita. Alih Bahasa: Fans Gromang.
- Wardiyanta. 2006. *Metode penelitian pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widjaja, AW. 2003. *Otonomi Desa, merupakan otonomi asli, bulat dan utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yoeti, Oka, A 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradaya Pratama.
- Yoeti, Oka, A. Edisi Revisi 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Penerbit Angkasa.

Lembaga

- Universitas Jember. 2012 *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember Universiti Press.

Universitas Jember. 2016 *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember Universiti Press.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintah Daerah*. 2 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019.

Jurnal dan Sejenis

Nuryanti, Wiendhu. Concept, Prespective and chalanges, Makalah Bagian Dari Laporan *Konferensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal. 2-3.

Rahim, Firmansyah. 2012. *Pedoman Pokdarwis*. Direktur Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif.

Ramadhani, Rosita. 2017. *Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang)*.

Sriharini, Dinda Anisa. 2017. *Pengembangan Desa Wisata Organik Di Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*.

Viktoria et al. *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau*. Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Internet

Marwan Fajar. 2018. *Desa Wisata Dongkrak*.

<https://www.antaranews.com/berita/479703/marwan-jafar-desa-wisata-dongkrak-ekonomi-pedesaan>

Wartaevent.com. 2018. *Travel Bondowoso The Highland Paradise.*

<https://wartaevent.com/travel/bondowoso-the-highland-paradise>

Kompas.com. 2015. *Megalitikum Menjadi Daya Tarik Pariwisata Bondowoso.*

<http://travel.kompas.com/read/2015/06/18/080600227/Situs.Megalitikum.Menjadi.Daya.Tarik.Pariwisata.Bondowoso>

Sometonnews.com. 2018. *Air Terjun Sumber Potensi Desa Wisata Glingseran.*

<http://www.semetonnews.com/post/read/3496/air-terjun-sumber-potensi-desa-wisata-glingseran->

Nusantara.news. 2018. *DPRD Bondowoso Sektor Pariwisata Perlu Dibenahi Segera.*

<https://nusantara.news/dprd-bondowoso-sektor-pariwisata-perlu-dibenahi-segera/>

Tribatanews.com. 2018. *Kapolres Bondowoso AKBP Afrizal Dukung Penuh Kemajuan Desa Wisata Rengganis di Glingsiran.*

<https://www.tribatanews.com/kapolres-bondowoso-akbp-afrizal-dukung-penuh-kemajuan-desa-wisata-rengganis-di-glingseran/>

Beritalima.com. 2018. *Glingsiran Peraih Penghargaan Desa Terbaik di Bondowoso.*

<https://beritalima.com/glingseran-peraih-penghargaan-desa-terbaik-di-bondowoso/>

Berdesa.com. 2018. *Pariwisata Indonesia Kalah Negara Tetangga Masalahnya.*

<http://www.berdesa.com/pariwisata-indonesia-kalah-negara-tetangga-masalahnya/>

LAMPIRAN**I. Pedoman Wawancara****PEDOMAN WAWANCARA I
PEMERINTAH DESA GLINGSERA, KECAMATAN WRINGIN
KABUPATEN BONDOWOSO**

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan / Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan!

- 1) Kapan desa wisata rengganis dipertimbangkan menjadi destinasi desa wisata kabupaten bondowoso?
- 2) Bagaimana prosesnya menjadi destinasi objek wisata?
- 3) Siapa saja yang terlibat dalam penetapan desa wisata rengganis menjadi destinasi objek wisata dikabupaten bondowoso?
- 4) Apa yang telah sudah dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata rengganis seperti promosi, sarana dan prasarana?
- 5) Apakah ada keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam mengelola desa wisata rengganis?
- 6) Apa bentuk keterlibatan/partisipasinya?
- 7) Apakah masyarakat memiliki partisipasi yang tinggi untuk ikut mengembangkan desa wisata rengganis?
- 8) Semenjak adanya desa wisata rengganis ini bagaimana dampak/ pengaruh terhadap penghasilan masyarakat?
- 9) Adakah agenda rutin yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama pihak pengelola melakukan evaluasi?

10) Sejauh ini, apa yang dilakukan dinas pariwisata, pemuda dan olah raga kabupaten bondowoso dalam mendukung pengelolaan desa wisata rengganis?



PEDOMAN WAWANCARA II
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN
BONDOWOSO

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan / Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan!

- 1) Kapan Desa Glingseran dipertimbangkan/dikukuhkan sebagai desa wisata Rengganis di Kabupaten Bondowoso?
- 2) Bagaimana proses/agenda hingga menjadi destinasi desa wisata rengganis?
- 3) Siapa saja yang terlibat dalam pembentukan menjadi destinasi desa wisata di kabupaten bondowoso?
- 4) Setelah menjadi desa wisata rengganis, siapa yang ditunjuk menjadi pengelola desa wisata tersebut?
- 5) Apa peran/keterlibatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bondowoso dalam pengelolaan desa wisata rengganis?
- 6) Bagaimana Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempromosikan desa wisata rengganis dikenal oleh wisatawan mancanegara?

**PEDOMAN WAWANCARA III
KELOMPOK SADAR WISATA**

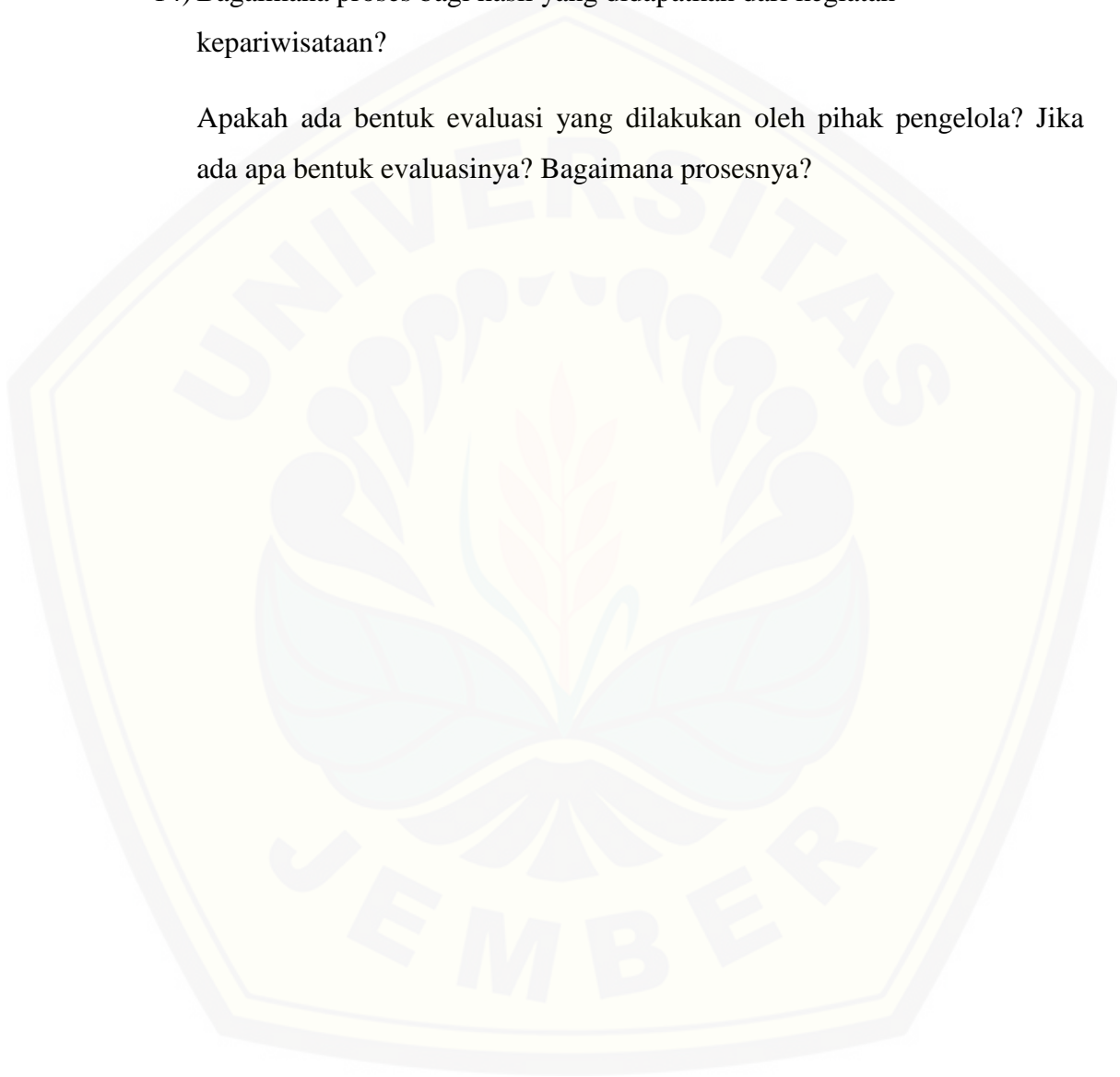
Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan / Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan!

- 1) Bagaimana awal ide atau gagasan pembentukan desa wisata rengganis?
- 2) Kapan desa wisata rengganis dipertimbangkan menjadi destinasi objek pariwisata di kabupaten bondowoso?
- 3) Bagaimana keputusan pembentukan desa wisata tersebut diambil?
- 4) Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan?
- 5) Apakah ada musyawarah yang digunakan untuk menampung ide/gagasan saat kegiatan perencanaan?
- 6) Setelah terbentuk menjadi objek wisata, bagaimana cara mempromosikan agar dikenal oleh masyarakat luas?
- 7) Bagaimana proses pembentukan organisasi pengelola desa wisata rengganis?
- 8) Apa peran dari masing masing aktor dalam pengelolaan desa wisata rengganis?
- 9) Bagaimana struktur organisasi atau pembagian tugas dalam kegiatan kepariwisataan?
- 10) Bagaimana pihak pengelola menggerakkan atau mengajak masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kepariwisataan?
- 11) Bagaimana kontribusi masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan?

- 12) Apakah ada kerjasama antara pihak pengelola dengan masyarakat terkait kegiatan kepariwisataan di desa glingseran?
- 13) Bagaimana dampak bagi masyarakat terkait setelah dibukanya desa wisata rengganis?
- 14) Bagaimana proses bagi hasil yang didapatkan dari kegiatan kepariwisataan?

Apakah ada bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pihak pengelola? Jika ada apa bentuk evaluasinya? Bagaimana prosesnya?



**PEDOMAN WAWANCARA IV
MASYARAKAT DESA GINGSERAN**

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan / Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan!

- 1) Bagaimana tanggapan bapak/ibu/ terhadap pembentukan desa wisata rengganis?
- 2) Apakah semua masyarakat hadir dalam musyawarah?
- 3) Apakah ada kesempatan untuk menyampaikan ide atau gagasan saat kegiatan perencanaan pembentukan desa wisata rengganis?
- 4) Siapa yang mengelola wisata tersebut? apakah apakah bapak/ibu ikut berpartisipasi dalam pengelolaan? Apa bentuk partisipasinya?
- 5) Bagaimana proses pembentukan organisasi pengelola desa wisata rengganis tersebut?
- 6) Bagaimana pihak pengelola mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan desa wisata rengganis?
- 7) Apakah masyarakat terlibat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan dilapangan?
- 8) Jika ada, bagaimana berlangsungnya kegiatan pertemuan tersebut? apa menyediakan ruang publik untuk menyampaikan pendapat atau sekedar laporan kegiatan?
- 9) Apakah bapak/ibu pernah memberikan kritik dan saran kepada pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan kepariwisataan?

- 10) Bagaimana pengaruh pengembangan desa wisata terhadap kehidupan masyarakat? Khususnya dampak sosial-ekonomi
- 11) Apakah bapak/ibu mendapatkan manfaat dengan dibentuknya desa wisata rengganis atau merasa dirugikan?
- 12) Apakah sudah maksimal dalam pengelolaan desa wisata rengganis yang dilakukan oleh pihak pengelola?



PEDOMAN WAWANCARA V
PENGUNJUNG DESA WISATA RENGGANIS

Nama Narasumber	:
Jenis Kelamin	:
Umur	:
Alamat	:
Jabatan / Pekerjaan	:

Daftar Pertanyaan!

- 1) Menurut anda bagaimana sarana dan prasarana yang ada di desa wisata rengganis ini? (kamar mandi, masjid, tempat sampah, tempat parker dan aksesibilitas jalan)
- 2) Bagaimana pendapat anda mengenai pelayanan pihak pengelola objek wisata dimulai dari parkir, ticketing hingga keamanan pengunjung?

II. Dokumentasi Wawancara






III. Dokumentasi Kepariwisataan





IV. Surat Izin Penelitian dan Lembaga Penelitian Universitas

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 2492/UN25.3.1/I.T/2018 12 Juli 2018
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

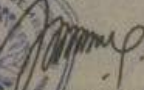
Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bondowoso
Di
Bondowoso

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 2487/UN25.1.2/I.T/2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,


Nama : Ridho Tri Afrianto
NIM : 140910201028
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl. Halmahera V No.2 Sumbersari-Jember
Judul Penelitian : "Pengelolaan Desa Wisata Rengganis Berbasis Kelompok Sadar Wisata Di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso"
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pariwisata Kab. Bondowoso
2. Kecamatan Wringin Kah. Bondowoso
3. Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kab. Bondowoso
4. BUMDES Desa Glingseran, Wringin Kab. Bondowoso
5. Pokdarwis Desa Glingseran Wringin Kab. Bondowoso
Lama Penelitian : 3 Bulan (16 Juli-30 September 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.


Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.


a.n. Ketua
Sekretaris II,
Dr. Susanto, M.Pd.
NIP. 198306161988021001

Tembusan Yth
1. Kepala Dispar Kab. Bondowoso;
2. Camat Wringin Kab. Bondowoso;
3. Kepala Desa Glingseran, Kec. Wringin Kab. Bondowoso;
4. Kepala BUMDES Desa Glingseran, Kec. Wringin Kab. Bondowoso;
5. Ketua Pokdarwis Desa Glingseran, Kec. Wringin Kab. Bondowoso;
6. Dekan FISIP Universitas Jember;
7. Mahasiswa ybs; ✓
8. Arsip.


CERTIFICATE NO : QMS/173

V. Surat Rekomendasi dari Bakesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor. 136-B Telp. 431678/ Fax. 424493
Email : bondowosobakesbangpol@gmail.com

BONDOWOSO

Bondowoso, 17 Juli 2018

Nomor : 070/ 584 /430.10.5/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth.Sdr. 1. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2. Kepala Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
di -
BONDOWOSO

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bondowoso.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember Nomor : 2492/JN25.3.1/LT/2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Ridho Tri Afrianto

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Ridho Tri Afrianto
NIM : 140910201028
Jurusan / Fakultas : Ilmu Administrasi Negara / Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember


Untuk melakukan Penelitian dengan :

Judul Proposal : " Pengelolaan Desa Wisata Rengganis Berbasis Kelompok Sadar Wisata Di Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso "

Waktu : 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 16 Juli s.d 30 September 2018
Lokasi : Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Desa Glingseran Kecamatan Wringin, BUMDES Desa Glingseran Kabupaten Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut untuk memberikan peyayanan kepada masyarakat dan / atau instansi / lembaga lainnya, maka demi kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diharapkan saudara untuk memberikan bantuan berupa konsultasi, informasi dan data atau bentuk lainnya baik tertulis maupun tidak tertulis yang diperlukan sesuai peraturan perundang – undangan.

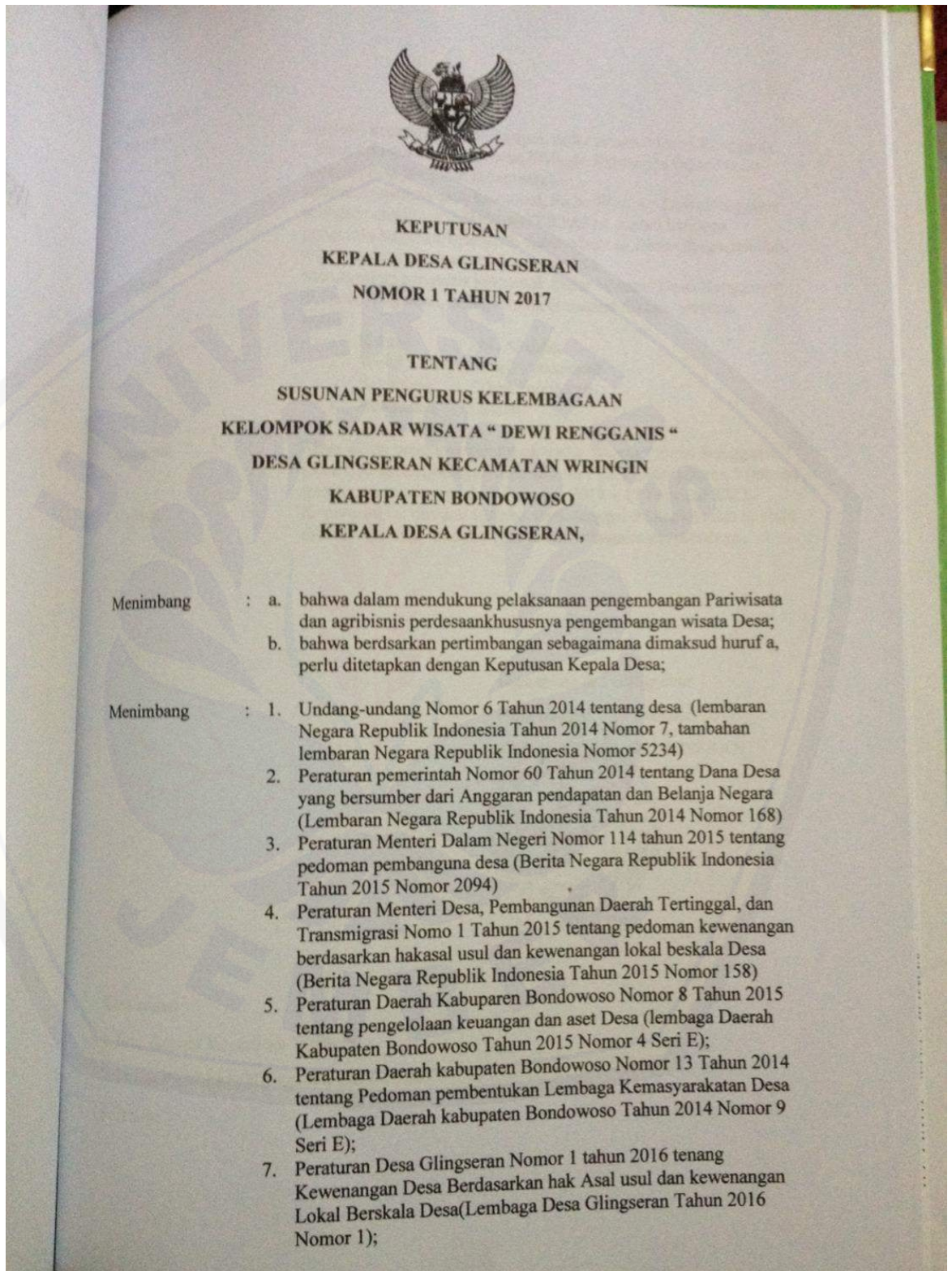
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


H. AHMAD PRAJITNO, S.H.,M.H.
Bertina Utama Muda
No. 19600309 196603 1 016

Tembusan :

1. Bupati Bondowoso (sebagai laporan)
2. Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember
3. Yang Bersangkutan

VI. SK Kelompok Sadar Wisata



MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : : Susunan kepengurusan kelompok sadar wisata “ Dewi Rengganis “ Desa Glingseran Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, sebagaimana lampiran keputusan ini;
- Kedua : : susunan kepengurusan kelompok Sadar Wisata “ Dewi Rengganis sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah lembaga pengelola kegiatan kelompok sadar wisata di Desa Glingseran, dan dikelola secara otonom oleh masyarakat.
- Ketiga : : Menugaskan pengurus kelompok Sadar Wisata “Dewi Rengganis“ di Desa Glingseran, sebagaimana dimaksud diktum pertama untuk :
- Ketua : M. Abdahu
- Wakil Ketua : Heri Hermansyah
- Sekertaris : Desi Fatmawati
- Bendahara : Bisnu
- Keempat : : Masa Kerja pengurus kelompok Sadar Wisata “ Dewi Rengganis “ Desa Glingseran, sebagaimana diktum PERTAMA selama 5 (tahun) terhitung mulai tanggal 17 Februari 2017 – 17 Februari 2022.
- Kelima : : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Glingseran

Pada tanggal : 17 Februari 2017

KEPALA DESA GLINGSERAN



Tembusan :

1. Sdr. Kepala Kecamatan Wringin
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Bondowoso
3. Arsip

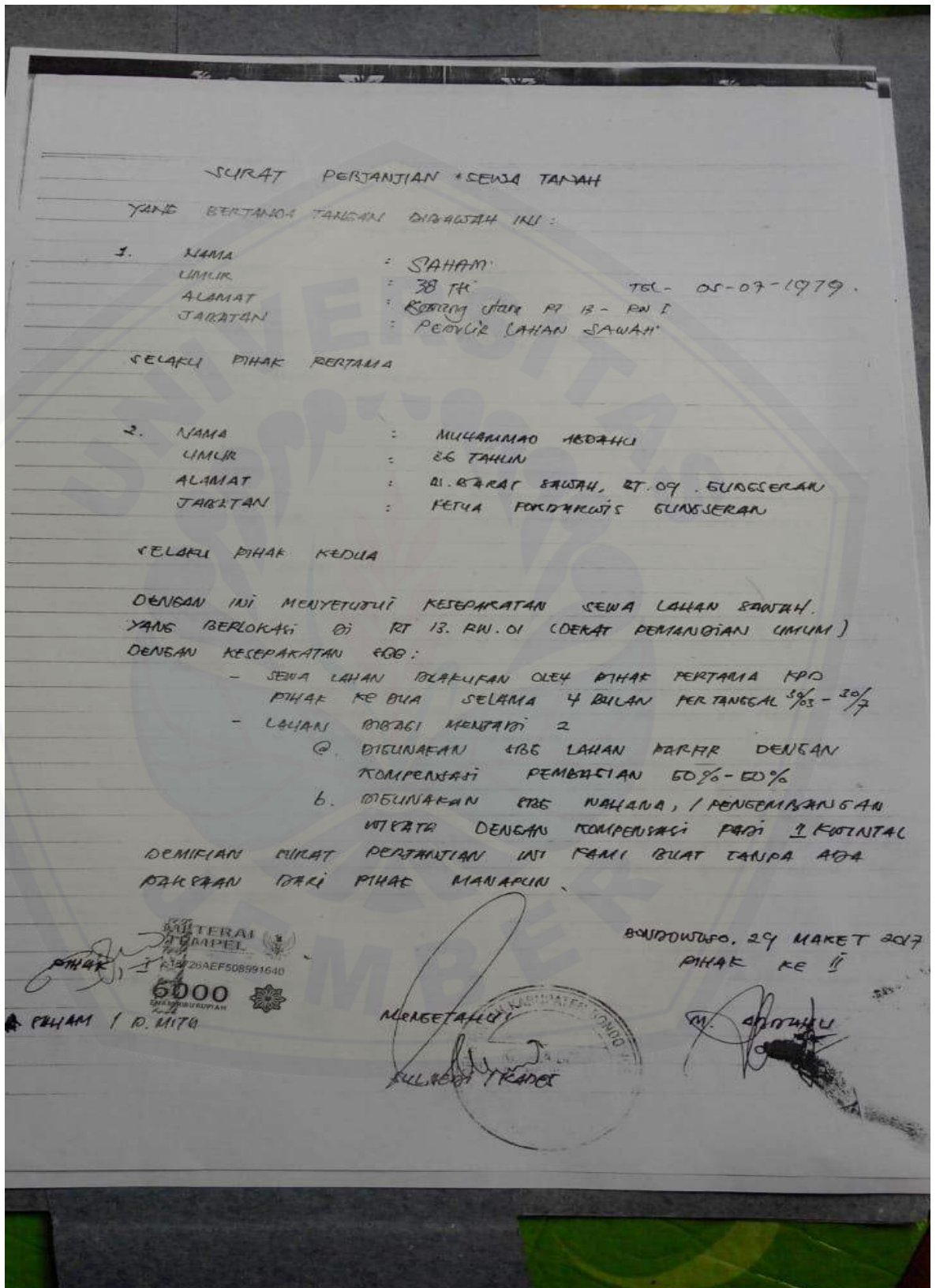
Lampiran : Keputusan Desa Glingseran
Nomor : 1 Tahun 2017
Tanggal : 17 Februari 2017
Tentang : Penetapan Kelompok Sadar Wisata
" DEWI RENGGANIS "
Desa Glingseran Kecamatan Wringin
Kabupaten Bondowoso

1. PENASEHAT : SULAEDI
2. KETUA POKDARWIS : M. ABDAHU
3. WAKIL KETUA : HERI HERMANSYAH
4. SEKERTARIS : DESI FATMAWATI
5. BENDAHARA : BISNU
6. SEKSI-SEKSI :
 - KEAMANAN DAN KETERTIBAN :HERI HERMANSYAH
 - KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN :ZAINUL
 - DAYA TARIK WISATA DAN KENANGAN :ABDAHU
 - HUMAS DAN PENGEMBANGAN SDM :ICUK CANDRA
 - PENGEMBANGAN USAHA :DESI
 - LAIN-LAIN :
 - > ATRAKSI : HARIS
 - > KULINER : SYAIFUL

Glingseran, 17 Februari 2017



VII. Perjanjian tertulis lahan Sawah menjadi tempat parkir



VIII. Daftar Pengunjung Pariwisata Kabupaten Bondowoso tahun 2017-2018

**GRAND TOTAL KUNJUNGAN WISATAWAN DI
KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BONDOWOSO
Tahun 2017**

No	Nama Obyek	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni	
		WisNus	WisMan	WisNus	WisMan	WisNus	WisMan	WisNus	WisMan	WisNus	WisMan	WisNus	WisMan
1	Kawah Ijen	8024	1211	7197	1601	7345	2815	9271	3421	10991	4099	11382	4180
2	Kawah Wurung	5465	179	1659	131	1036	182	2383	142	3145	313	3771	470
3	Air Terjun Gentongan	990	8	626	13	430	3	205	0	59	0	365	7
4	Patirana P28	2266	0	2447	0	1327	0	2227	0	2440	0	2988	0
5	Pemandangan Arak-Arak	531	0	1455	0	797	0	1468	0	1520	0	4417	2
6	Air Terjun Tancak Kembar	896	0	272	2	166	2	418	0	246	6	626	0
7	Air Terjun Goa Tunggul	108	0	216	0	96	0	313	0	231	0	482	0
8	Desa Wisata Almour	4639	2	10104	0	3634	0	5275	0	2780	2	4351	3
9	Desa Wisata Lombok Kulon	546	0	687	0	569	0	354	0	285	0	715	0
10	Pemandian Tasnan Baru	4381	0	2770	0	1353	0	2861	0	2765	0	1535	0
11	Pemandian Air Hangat Blawan	1387	13	593	7	334	0	595	0	442	0	909	0
12	Pemandian Kelapa Gading	8300	0	3216	0	570	0	783	0	858	0	1926	0
13	Pemandian Kharisma	7702	0	1291	0	882	0	1010	0	1471	0	1590	0
14	Bosamba Rafting	45	0	0	0	30	0	79	0	41	0	24	0
15	River Tubing	10	0	45	0	47	0	107	0	51	0	86	0

Digital Repository Universitas Jember

Tlogosari													
16	Museum Kereta Api	573	0	844	0	729	0	1308	0	1210	4	924	19
17	Makam Ki Ronggo	443	0	305	0	283	0	510	0	519	0	391	0
18	Padepokan Seni Gema Buana	247	0	226	0	204	0	160	0	98	0	128	0
19	Batik Sumbersari	581	0	493	0	519	0	587	0	585	0	593	0
20	Sumber Salak	72	0	35	0	22	0	23	0	38	0	22	0
21	Situs Pekauman	20	0	17	0	107	0	32	3	398	0	138	0
22	Taman Rengganis dan Situs Glingseran	31	0	1793	3	2037	0	3675	0	1575	0	1565	0
23	Batu Susun Solor	184	0	61	0	79	0	735	2	259	2	428	0
24	Pendakian Gunung Raung	4	9	28	0	74	2	74	10	27	0	15	3
25	Situs Banyu Putih	54	0	112	0	71	0	81	0	118	0	65	0
Jumlah		47499	1422	36492	1757	22741	3004	34534	3578	32152	4426	39436	4684
Total Kunjungan		48921		38249		25745		38112		36578		44120	

No	Nama Obyek	Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Total	
		WisNus	WisMan	WisNus	WisMan	WisNus	WisMan	WisNus	WisMan	WisNus	WisMan	WisNus	WisMan	WisNus	WisMan
1	Kawah Ijen	8279	4245	7181	4378	3558	4467	3567	4420	3679	3849	4406	2558	84880	41244
2	Kawah Wurung	4788	509	1758	494	1624	381	1442	279	1919	142	3002	143	31992	3365
3	Air Terjun Gentongan	128	2	55	14	124	48	73	5	63	8	96	0	3214	108
4	Patirana P28	4963	4	2867	0	1899	3	1702	6	1381	0	2338	0	28845	13
5	Pemandangan Arak-Arak	3493	0	3642	74	4946	54	4152	45	4845	43	5170	64	36436	282
6	Air Terjun Tancak Kembar	431	0	114	5	289	15	403	10	218	9	574	3	4653	52
7	Air Terjun Goa Tunggal	361	0	446	0	364	0	102	0	70	0	131	0	2920	0
8	Desa Wisata Almour	4006	0	3982	0	3698	3	3576	0	3206	0	4124	0	53375	10
9	Desa Wisata Lombok Kulon	354	0	251	11	234	6	265	4	318	6	488	0	5066	27
10	Pemandian Tasnan Baru	2309	0	2190	0	2064	0	2419	3	2232	0	3347	0	30226	3

Digital Repository Universitas Jember

11	Pemandian Air Hangat Blawan	584	0	461	39	435	40	383	135	389	19	1863	42	8375	295
12	Pemandian Kelapa Gading	1079	0	1051	0	838	0	1173	0	940	0	2616	0	23350	0
13	Pemandian Kharisma	1968	0	1578	0	1659	0	1411	0	1256	0	3305	0	25123	0
14	Bosamba Rafting	20	0	47	0	46	0	42	0	25	0	0	0	399	0
15	River Tubing Tlogosari	18	0	53	0	26	0	84	0	145	0	373	9	1045	9
16	Museum Kereta Api	902	28	918	0	954	18	1091	43	625	4	1162	0	11240	116
17	Makam Ki Ronggo	469	0	427	2	319	7	288	2	248	3	293	0	4495	14
18	Padepokan Seni Gema Buana	152	0	200	0	152	6	221	0	202	0	265	0	2255	6
19	Batik Sumbersari	540	0	647	0	438	0	426	0	433	0	421	0	6263	0
20	Sumber Salak	12	0	31	0	19	0	41	0	31	0	127	0	473	0
21	Situs Pekauman	238	0	259	12	104	13	80	15	186	8	627	0	2206	51
22	Taman Rengganis dan Situs Glingseran	3169	0	1329	0	1330	0	933	3	1070	4	2075	0	20582	10
23	Batu Susun Solor	172	22	226	29	299	27	1323	21	4868	79	3530	0	12164	182
24	Pendakian Gunung Raung	10	4	34	0	15	3	35	4	21	0	97	0	434	35
25	Situs Banyu Putih	111	6	53	6	70	12	46	4	77	6	115	0	973	34
	Jumlah	38556	4820	29800	5064	25504	5103	25278	4999	28447	4180	40545	2819	400984	45856
	Total Kunjungan	43376		34864		30607		30277		32627		43364		446840	

Keterangan : Data sampai dengan 31 Desember 2017

Bondowoso, Januari 2018

**KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Drs. HARRY PATRIANTONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19631027 199203 1 006

Digital Repository Universitas Jember

1	Makam Ki Ronggo	283	0	282	3	198	4	281	0	393	4	239	0
	WIS. BUDAYA												
1	Padepokan Seni Gema Buana	217	0	175	0	142	0	113	0	108	0	123	0
2	Batik Summersari	287	0	340	0	300	9	420	0	427	4	917	9
3	Situs Megalit Pekauman	2	0	90	4	102	12	193	0	66	0	143	0
4	Situs Banyu Putih	2	0	45	0	49	3	43	0	34	0	63	0
	Jumlah	39229	1927	20708	1949	17797	1149	20775	2049	14255	1762	31847	4154
	Total Kunjungan	41156		22657		18946		22824		16017		36001	

No	Nama Obyek	Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Total	
		WisNus	WisMan	WisNus	WisMan	WisNus	WisMan	WisNus	WisMan	WisNus	WisMan	WisNus	WisMan	WisNus	WisMan
	WIS. ALAM														
1	Kawah Ijen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20971	11656
2	Kawah Wurung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6592	501
3	Patirana P28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5678	0
4	Pemandangan Arak-Arak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10771	267
5	Air Terjun Tancak Kembar	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2362	51
6	Air Terjun Busa / Gentongan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	16
7	Pendakian Gunung Raung	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	12
8	Batu Susun Solor	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11731	53
9	Puncak Potreh Koning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1054	0
10	Puncak Mergasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816	4
11	Bukit Mahadewa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4711	0
	DESA WISATA														
1	Desa Wisata Almour	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19503	0
2	Desa Wisata Lombok Kulon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2897	7
3	Taman Rengganis dan Situs Glingseran	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6175	0
	WIS. BUATAN dan MINAT KHUSUS														
1	Pemandian Tasnan Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14175	4
2	Pemandian Air Hangat Blawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3692	318
3	Pemandian Kelapa Gading	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9547	0
4	Pemandian Kharisma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13210	0

Digital Repository Universitas Jember

5	Bosamba Rafting	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	0
6	River Tubing Tlogosari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0
7	Museum Kereta Api	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4951	51
	WIS. RELIGI														
1	Makam Ki Ronggo	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1843	11
	WIS. BUDAYA														
1	Padepokan Seni Gema Buana	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920	0
2	Batik Sumbersari	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2818	22
3	Situs Megalit Pekauman	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605	16
4	Situs Banyu Putih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	3
	Jumlah	2027	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Total Kunjungan	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan : Data sampai dengan per Mei berjalan 2018

Bondowoso, Januari 2019

**KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Drs. HARRY PATRIANTONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631027 199203 1 006